

SKRIPSI
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEBGELOLAAN
PARIWISATA PANTAI PASIR PUTIH BIRA KABUPATEN BULUKUMBA

Disusun dan diusulkan oleh:

ANDI HARIADI

Nomor Stambuk : 10564 0211415



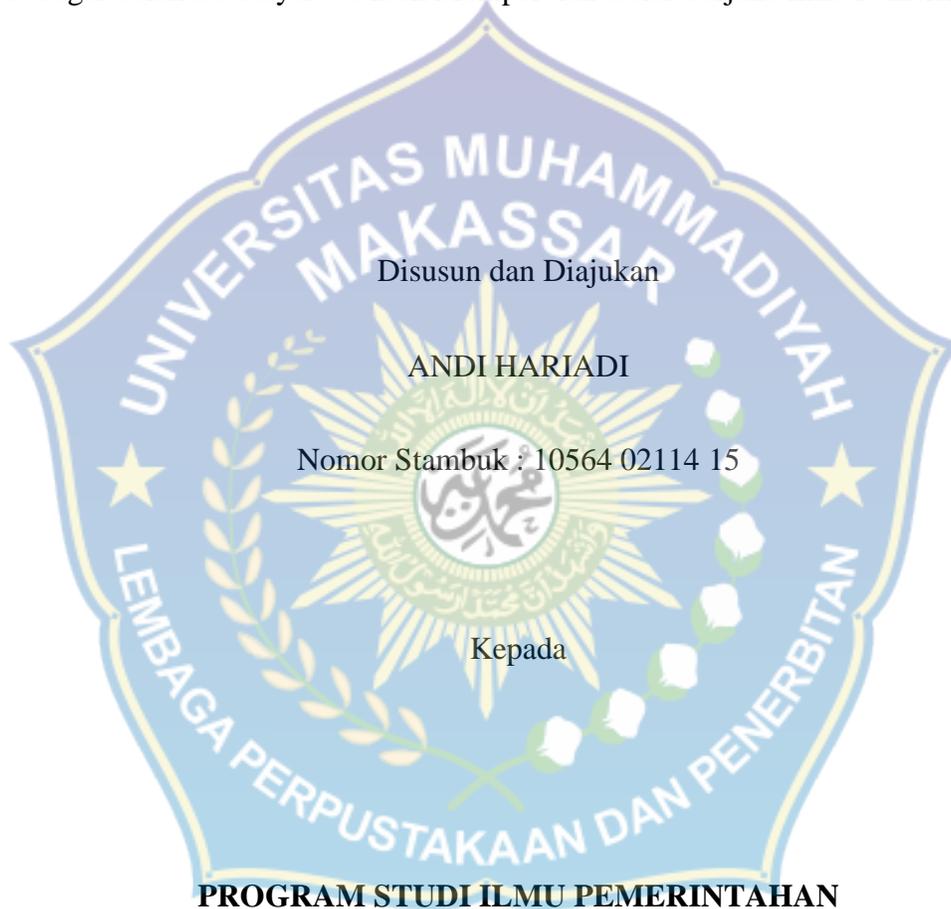
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
PARIWISATA PANTAI PASIR PUTIH BIRA KABUPATEN BULUKUMBA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Pantai
Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba
Nama Mahasiswa : Andi Hariadi
Nomor Stambuk : 10564 0211415
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Fatmawati, M.Si


Nurbiah Tahir, S.Sos., M.Ap

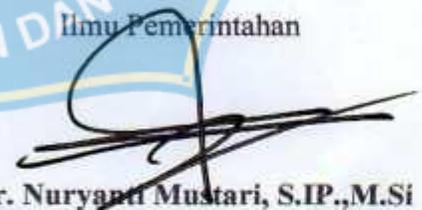
Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Nhyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0056/FSP/A.3-VIII/IX/41/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Senin, 30 September 2019.



TIM PENILAI

Ketua: 
Dr. Hj. Inyani Malik, S.Sos., M.Si

Sekretaris: 
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Fatmawati, M.Si  (.....)
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd  (.....)
3. Dr. Jaelan Usman, M.Si  (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Hariadi
Nomor Stambuk : 105640211415
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiarisme. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 25 September 2019

Yang Menyatakan,

Andi Hariadi

ABSTRAK

ANDI HARIADI (2019). *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba

(Dibimbing oleh: Hj Fatmawati dan Nurbiah Tahir)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih bira Kabupaten Bulukumba Metode penelitian ini menggunakan tipe fenomenologi untuk menemukan makna yang menggali data jenis penelitian kualitatif. Fokus penelitian berdasar pada teori BALOGH DKK yang melihat kolaborasi pemerintah terbagi menjadi 3 proses yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, dan dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi. Adapun teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dinamika proses pengelolaan pariwisata pantai pasir putih bira Kabupaten Bulukumba dalam a) pergerakan prinsip bersama pengungkapan sudah cukup baik karena melibatkan pihak lain namun dalam deliberasi belum berjalan dengan baik karena jarang melakukan diskusi b) motivasi bersama kepercayaan belum baik karena dalam dimensi kepercayaan bersama pemahaman, dan komitmen walaupun legitimasi internal sudah jelas. c) kapasitas melakukan tindakan bersama dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih bira Kabupaten Bulukumba sudah baik dari dimensi prosedur dan kesepakatan bersama namun dalam belum baik dalam dimensi kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya. (2) tindakan-tindakan kolaborasi belum baik dari dimensi memfasilitasi dan memajukan proses kolaborasi karena jarang melakukan sosialisasi dan pelatihan serta komunikasi antara pihak yang bekerjasama tidak terjalin dengan baik. (3) dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi sudah memberikan dampak dilihat dari kesadaran masyarakat mulai tumbuh akan sadar wisata namun belum signifikan dilihat dari kondisi pantai bira belum berkembang dengan baik karena tujuan sapta pesona belum tercapai secara keseluruhan.

Kata Kunci: Kolaborasi, Pengelolaan, Pariwisata

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata terindah yang patut di ucapkan oleh peneliti selain puji syukur yang sebesar-besarnya hanya kepada Allah *Subhanahu wata'ala* yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan kepada hambaNya. Atas perkenannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan mempersembahkan skripsi ini, bukti dari perjuangan yang panjang dan jawaban atas do'a dan senantiasa mengalir dari orang-orang terkasih. Sholawat serta salam “*Allahumma Sholli Ala Sayyidina*” juga peneliti sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sang pejuang sejati yang telah membawa kita dari tidak tau menjadi tau.

Skripsi dengan judul “***Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba**” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa mulai dari awal hingga akhir proses pembuatan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak rintangan, hambatan, dan cobaan yang selalu menyertainya. Hanya dengan ketekunan dan kerja keraslah sehingga

membuat penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga dengan adanya berbagai bantuan baik berupa moril dan materil dari berbagai pihak sehingga mempermudah penyelesaian penulisan skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Andi Malla dan Ibunda Andi Sittiara, dan Tante Andi Saenab serta Kakak-kakak saya Andi Omang, Andi Akbar, Andi Herlina, Andi Ilham yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang, cinta dan pengorbanan serta do'a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis.

penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Bapak Dr. Hj. Fatmawati, M.Si dan Ibu Nurbiah Tahir. S.Sos.,M.AP selaku pembimbing I dan II penulis yang selalu memberikan arahan dan dorongan atas penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis ± 4 tahun menampaki jenjang pendidikan di bangku kuliah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Dr. H. Abd Rahman, SE.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Para Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh informan yang berada pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kelompok Sadar Wisata Bira atas kesediannya memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengambil data dalam rangka merampungkan penelitian.
8. Sahabat-sahabat SMPku sry , rini, fandi, anil yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
9. Sahabat-sahabat SMAku Tari, Ayu, Dilla, Aan, yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis selama mengerjakan skripsi.
10. Sahabat-sahabatku seperjuangan di bangku perkuliahan Ime, Titin, Fifin, Kak Sinar, Kak Indah, Fitri, Tri, Wulan,Dina, Ika, Cevy, Rahma, Alfi, Sri, Ririn, Akbar, Wili, Jaya, Sofyan, Herul, Syawal, Arfan, Adi, fandi, Rahmad, Iksan, Fery, Kak Iccang,Egi, Alam, Ilham yang selalu ku repotkan dan selalu memberikan dukungan, bantuan serta do'a kepada penulis selama ± 4 tahun terakhir ini.

11. Teman-teman KKP Desa Paddinging Hamzah, Mustafa, Sintia, Fitra, Eka, Ulfa, yang selalu memberikan support dan bantuan kepada penulis selama penulisan skripsi.
12. Keluarga Besar KPS (Komunitas Peduli Sosial) yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 03 September 2019

Penulis

Andi Hariadi

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Penerimaan Tim	iv
Halaman PernyataanKeaslianKaryaIlmiah	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep <i>Collaborative Governance</i>	8
1. Pengertian <i>Colaborative</i>	8
2. Pengertian <i>Governance</i>	10
3. Pengertian <i>Collaborative Governance</i>	13
4. Proses <i>Collaborative Governance</i>	19
B. Konsep Pengelolaan Pariwisata.....	20
1. Pengertian Pariwisata	20
2. Tujuan Pengelolaan Pariwisata	21
C. Kerangka Fikir.....	22
D. Fokus Penelitian	24
E. Depskripsi Fokus Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	27
D. Informan Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Pengabsahan Data	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum lokasi Penelitian	32
1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba	32
2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata	33
3. Gambaran Umum POKDARWIS	42
4. Gambaran Umum Pantai Pasir Putih Bira.....	44
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba	45
1. Dinamika Kolaborasi	46
2. Tindakan-tindakan Kolaborasi	66
3. Dampak dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	28
------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses <i>Collaborative Governance</i>	19
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Bulukumba	34
Gambar 4.2 Struktur Organisasi POKDARWIS	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan rasa stress dengan menikmati pemandangan yang disuguhkan objek wisata. Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut spilane (dalam Susilawati 2016) pariwisata merupakan suatu perjalanan dari suatu tempat ketempat yang lain berisifat kontenporer yang di lakukan individu atau kelompok sebagai usaha untuk menemukan suatu kebahagiaan, keseimbangan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.

Keputusan orang untuk melakukan perjalanan wisata bermula dari keinginan manusia untuk menikmati pemandangan lingkungan yang ada di objek wisata, oleh karena itu pariwisata harus dikelola dan dikembangkan secara baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

Perkembangan tata kelola pada pemerintahan, *collaborative governance* (tata kelola pemerintahan kolaborasi) menjadi fenomena dan (*trend*) baru yang menarik diteliti Ansell dan Gash (dalam Zaenuri 2016). *Collaborative Governance* merupakan salah satu cara untuk merespon keinginan para pemegang kepentingan terlibat dalam pelaksanaan

pembangunan dan merespon keterbatasan pendanaan pemerintah yang tidak bisa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang semakin baik, tujuannya untuk mendapatkan sumberdaya guna dalam pelaksanaan pembangunan sesuai harapan para pemegang kepentingan tersebut. Sumber daya tersebut berada dan dimiliki oleh para pemegang kepentingan (Sambodo, 2016).

Ansell dkk (dalam Tresiena dkk, 2017) mengkonfilasi beberapa prasyarat terciptanya proses kolaborasi, yaitu: (1) Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan, (2) Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan, dan (3) Terdapat aktor-aktor yang kompeten.

Pariwisata memiliki sifat yang kompleks oleh karena itu dalam mengelolah pariwisata perlu adanya kerjasama antara swasta, pemerintah maupun masyarakat agar pariwisata dapat berkembang secara baik dan memberikan manfaat bagi manusia. Pembangunan pariwisata mampu menggairahkan aktivitas bisnis untuk menghasilkan manfaaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi suatu negara. Ketika pariwisata direncanakan dengan baik, mestinya akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada sebuah destinasi. Muncul dan berkembangnya kegiatan pada pariwisata tidak lain karena di wilayah tersebut terdapat objek yang spesifik dan unik sehingga memiliki daya tarik yang tidak ada di tempat lain sehingga menarik untuk dikunjungi. Sebagaimana diketahui bahwa wisata mempunyai hakekat keunikan, kekhasan, perbedaan, orisinalitas, keanekaragaman, dan

kelokalan sehingga menarik banyak orang untuk melakukan perjalanan wisata. Inskeep (dalam zaenuri; 2016).

Sulawesi Selatan adalah daerah yang berada di Indonesia timur menjadi salah satu provinsi yang menawarkan berbagai objek wisata baik itu wisata alam, budaya dan buatan. Banyaknya objek wisata yang ada di Sulawesi Selatan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel pada juli 2018 wisman mencapai 1.566 kunjungan. Jumlah wisman tersebut naik sebesar 28,78 jika dibandingkan dengan jumlah wisman pada juni 2018 yang mencapai 1.216 kunjungan, jumlah wisman tersebut yang masuk melalui pintu masuk Makassar naik hamper 30 persen secara bulanan. Ini mengindikasikan bahwa objek wisata yang berada di Sulawesi selatan memiliki daya tarik yang luar biasa untuk menarik perhatian wisatawan mancanegara terhadap kepariwisataan daerah. Beberapa objek wisata yang menjadi unggulan di Sulawesi selatan adalah pantai Bira yang berada di Kabupaten Bulukumba dan Tanah Toraja. (Makassar.tribunnews.com, 3/09/2018).

Bulukumba merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang tentunya memiliki daya tarik tersendiri untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini didasarkan pada potensi wisata yang dimilikinya. Daerah yang dikenal sebagai tempat pembuatan perahu phinsi ini memiliki letak geografis yang terdiri dari daerah pegunungan dan pesisir pantai sehingga memiliki kekayaan objek budaya dan objek wisata. Sehingga

menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Salah satu objek yang sangat diminati oleh para wisatawan adalah pantai Bira karena keindahan pasir putih yang terhampar luas dan air laut yang jernih membuat pemandangan di Pantai ini menjadi sangat menakjubkan.

Pantai Tanjung Bira merupakan pantai berpasir putih yang sangat terkenal di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan keindahan yang dimiliki pantai Bira membuatnya terkenal di mancanegara. Keindahan pantai Tanjung Bira tidak diragukan lagi hamparan pasir putih yang luas dan airnya yang jernih membuat nyaman wisatawan. Para wisatawan dapat menghabiskan waktunya untuk menikmati matahari terbit dan matahari tenggelam, dan menghabiskan waktu liburnya dengan berenang, menyelam, atau hanya sekedar menikmati segarnya angin yang berhembus. Secara geografis pantai ini berada di ujung selatan pulau Sulawesi, tepatnya berada di Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dengan jarak kurang lebih 40 KM dari Bulukumba atau 200 KM dari Makassar.

Perbub Kabupaten Bulukumba Nomor 188 tahun 2019 tentang Penetapan Desa Wisata Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba merupakan acuan bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dalam merencanakan dan mengembangkan kegiatan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Bulukumba termasuk Pantai Bira secara terpadu.

Berdasarkan wawancara kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba (14 maret 2019), dapat di ketahui bahwa dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata pantai bira, pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat. Dasar dari kolaborasi antara kedua pihak adalah SK Kepala Dinas Pariwisata yang mengakui bahwa pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira terjadi kolaborasi karena adanya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam merawat dan mengembangkan objek wisata tersebut. Namun kolaborasi yang dilakukan ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena masyarakat tidak terlalu aktif dan masih kurangnya informasi serta upaya pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sehingga kolaborasi tidak berjalan dengan efektif.

Objek wisata pantai bira yang sudah mendunia memiliki potensi yang sangat besar. Tanjung Bira menawarkan hal seperti pantai pasir putih dan pemandangan alam bawah laut. Namun dalam pengelolaannya masih mengalami kendala. Peran pemerintah daerah sebagai pengelola belum maksimal dan menunjukkan keterbatasan dalam kapasitasnya mengelola pariwisata. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menjadi persoalan yang mendasar untuk mengembangkan sekkor pariwisata pantai bira. Karena untuk mengembangkan pantai bira dibutuhkan sumber daya yang memadai.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa perlu adanya peran aktif dari pemerintah dan non-pemerintah dalam melakukan kolaborasi agar pariwisata dapat dikelola degan baik. Karena didalam *collaborative gavernance*

pemerintah dan non-pemerintah aktif berpartisipasi. Sehingga pariwisata dapat berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan dan bias memberikan manfaat.

Berdasarkan paparan di atas menjadi pertimbangan atau alasan penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai “*Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba*” dalam penulisan proposal ini penulis mencoba menggali informasi mengenai kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah, dan masyarakat dalam mengelola pariwisata di pantai Bira.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira di Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana tindakan-tindakan kolaborasi dalam pengelolaan Pariwisata pantai pasir putih Bira di Kabupaten Bulukumba?
3. Bagaimana dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira di Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai:

1. Untuk mengetahui bagaimana dinamika kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih bira di Kabupaten Bulukumba?

2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan-tindakan kolaborasi dalam pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira di Kabupaten Bulukumba?
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pantai bira Kabupaten Bulukumba

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Dibidang ilmu Manajemen Pemerintahan, dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan pariwisata
 - b. Menambah wawasan mengenai studi *Collaborative Governance* dalam pengelolaan pariwisata
2. Secara Praktis
 - a. Pemerintah, penelitian ini diharapkan Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dalam memberikan kesadaran warga tentang pengelolaan pariwisata yang baik.
 - b. Masyarakat, diiharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan pariwisata dan hasil-hasilnya yang telah dicapai, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas kebijakan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *Collaborative Governance*

1. Pengertian *Collaborative*

Collaborative (kolaboratif) yang berarti bekerja sama atau *collaboration* yang berarti kerja sama. Dalam pengertian yang lebih luas Frans & Bursuck (dalam Afdal 2015) mendefinisikan kolaboratif sebagai gaya atau cara yang dipilih oleh para professional untuk pencapaian tujuan bersama. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang terlibat didalam kegiatan kolaboratif memiliki tujuan yang sama, tidak boleh berbeda, sehingga membutuhkan adanya mekanisme perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut secara bersama sehingga tujuan akan dapat dicapai. Hal ini sesuai dengan pendapat Idol & Baran (dalam Afdal 2015) yang menyatakan bahwa *in collaborative, planning and implementing are joint effort*. Ini berarti bahwa dalam pelaksanaan kolaboratif yang efektif kegiatan perencanaan dan pelaksanaan merupakan usaha bersama.

Sink (dalam Zaenuri 2016) menjelaskan bahwa kerjasama kolaboratif sebagai proses diaman oragnisasi-organisasi yang memiliki sebuah kepentingan terhadap masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai jika dilakukan sendiri-sendiri. Hal ini didukung oleh pendapat dari Fosler (dalam Zaenuri 2016) menjelaskan secara lebih spesifik mengenai kerja sama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama antar pihak yang intensif,

termasuk adanya usaha secara sadar untuk melakukan *eligment* dalam tujuan, strategi, agenda, sumberdaya dan aktivitas. Kedua institusi yang pada dasarnya memiliki tujuan yang tidak sama membangun *shared vision* dan berusaha mewujudkannya secara bersama. Dengan adanya visi yang sama maka setiap komponen memungkinkan untuk berpartisipasi dalam urusan yang disepakati bersama. Dari konsep kolaboratif yang memungkinkan untuk terjadinya kerjasama diantara ketiga pilar *governance* karena sudah diyakini adanya visi bersama maka akan semakin menumbuhkan partisipasi yang tinggi pada sektor non pemerintahan. Masyarakat dan pihak swasta memperoleh ruang yang luas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam manajemen urusan-urusan publik.

Sebagian besar pemerintah telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Akan tetapi kerjasama yang dibangun hanya sebatas konvensional, yaitu sebatas pada kerjasama antara pemerintah sebagai pemilik pekerjaan dan lembaga swasta sebagai kontraktor. Kerjasama ini tidak lebih dari transaksi jual beli barang dan jasa antara pemerintah dan pihak swasta. Kerjasama yang bersifat jangka pendek dengan intensitas hubungan yang terbatas, sebagaimana diatur dalam kontak. Kemanfaatan kerjasama dihitung sebagai kompensasi atau prestasi dan resiko ditanggung oleh masing-masing pihak. Kalau dilihat dari pola kerjasama tersebut kelihatannya sudah ada kemitraan antara pemerintah dan non pemerintah namun kenyataannya belum ada.

Seharusnya pemerintah lebih memahami kerjasama sebagai kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, masing-masing dari pihak berusaha melakukan inisiasi, penyamaan visi, penyatuan tujuan, strategi dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Meskipun begitu masing-masing pihak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan secara independen. Hubungan yang dibangun dengan masyarakat bersifat kolaboratif, hubungan prinsipal agen tidak akan berlaku karena kerjasama yang terjadi adalah kerjasama antara prinsipal dengan prinsipal (Dwiyanto, 2010).

Para pihak yang berkolaborasi adalah prinsipal sekaligus bertindak sebagai agen untuk mereka sendiri. Kemitraan melibatkan dua pihak untuk saling berbagi sumberdaya, resiko, tanggung jawab dan manfaat. Sifat kerjasama seperti ini membuat kemitraan berorientasi pada kepentingan jangka panjang karena memerlukan daya tahan dan interaksi yang cukup tinggi dari kedua pihak. (Dwiyanto, 2010)

2. Pengertian *Governance*

Pembahasan mengenai *Governance* sudah mengalami perkembangan yang panjang, pendapat dari Peter dan Piore (1998:223-224) mengemukakan bahwa *governance* memiliki empat elemen dasar, yaitu: 1) dominasi jaringan (*the domination of network*), dalam sebuah kebijakan formal, pemerintah didominasi oleh orang-orang yang memiliki pengaruh, hal ini berkaitan dengan suatu barang dan jasa yang akan diproduksi, 2) kemampuan dari negara yang semakin menurun untuk melakukan kontrol langsung (*the state's declining capacity for direct control*). Walaupun kini pemerintah tidak lagi melakukan

kontrol terpusat akan kebijakan publik, akan tetapi masih memiliki kekuatan untuk mempengaruhinya. Kini kekuatan negara dikaitkan dengan kemampuannya dalam bernegosiasi dan berunding dengan aktor yang ada dalam jaringan kebijakan. semua anggota yang ada dalam jaringan ini diterima sebagai mitra dalam sebuah proses kebijakan, 3) menggabungkan sumber daya publik dan swasta (*the blending of public and private resources*). Para aktor publik dan swasta bekerjasama untuk memperoleh sumber daya yang tidak bisa didapatkan secara mandiri. Seperti, menggunakan suatu perusahaan swasta untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan memungkinkan pemerintah untuk menghindari beberapa masalah prosedural seta akuntabilitas yang mahal dan memakan waktu yang relatif lama. Perusahaan mampu melakukan negosiasi kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang menguntungkan kepentingan publik akan tetapi tidak mungkin dibiayai oleh pihak swasta sendiri, dan 4) penggunaan beberapa instrumen (*use of multiple instrument*). Ini merupakan peningkatan keinginan untuk mengembangkan dan menggunakan metode non-tradisional dalam membuat dan menjalankan kebijakan publik. Hal ini juga digunakan melalui instrumen tidak langsung, misalnya menggunakan intensif pajak untuk mengubah sebuah perilaku.

Bevir (dalam Zaenuri 2016) telah mengemukakan bahwa *governance* adalah perubahan sistem tata pemerintahan yang meliputi: 1) pergantian dari sistem hirarki dan pasar menjadi sistem jaringan dan kemitraan, 2) melakukan interkoneksi antara administrasi negara dengan masyarakat sipil, 3) pergantian

sistem administrasi yang mengandalkan penekanan dan kontrol menjadi pengarahan dan koordiansi, 4) pergantian aktivitas pemerintah dari pengaturan dan intruksi menjadi negosiasi dan diplomasi,5) penyertaan aktor non negara dalam proses kebijakandan pelayanan publik.

Dari wacana konseptual hingga praktis, konsep *governance* ternyata masih dihadapkan dengan persoalan yang besar dan menjadi tantangan bagi para ahli administrasi publik, masalah yang muncul sehubungan dengan paradigma manajerial dan demokrasi Bevir (dalam Zaenuri 2016). Dari paradigma manajerial, organisasi dengan banyak aktor-aktor dalam jaringan masih kurang memperlihatkan komando yang jelas misalnya birokrasi yang bersifat hirarkis. Para pembuat kebijakan dan lain-lain telah berusaha untuk mendapatkan cara yang efektif bertindak dalam pengaturan baru. Keikutsertaan aktor non-negara dalam pembuatan kebijakan dan pelayanan menimbulkan prnyataan apakah hasilnya adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi atau berpihak pada pemerintah atau swasta. Akuntabilitas telah menjadi perhatian oleh lembaga baru dan model partisipasi.

Walaupun masih menimbulkan masalah namun keberadaan teori *governance* kini semakin signifikan dalam pelaksanaan urusan publik. Keikutsertaan aktor non-negara dalam urusan publik dengan tanpa mengedepankan kesejahteraan masyarakat menjadi permasalahan tersendiri. Masalah model partisipasi yang sesuai agar tidak melemahkan kekuatan negara juga perlu pejelasan lebih mendalam lagi. Jaringan yang seharusnya dibangun untuk menghadirkan kerjasama diantara *stakeholder* masih

mebutuhkan upaya yang berkelanjutan, demikian juga sebagai akhir dari kolaborasi diantara ketiga pilar *governance* dibutuhkan pola kemitraan yang berorientasi jangka panjang dan memperoleh hasil yang sama-sama menguntungkan.

Sejalan dengan timbulnya pergeseran paradigma dari *government* ke *governance* merupakan cerminan dari *political will* pemerintah untuk menggerakkan reformasi *governance* melalui penerapan prinsip-prinsip *governance* yang baik (*good governance*). Memandang bahwa teori *good governance* memiliki kerumitan yang tinggi dan kendala yang cukup besar maka dibutuhkan sebuah langkah strategis untuk memulai pembaharuan praktek *governance*, pengembangan akan lebih mudah dilakukan jika dimulai dari sektor pelayanan publik (Dwiyanto, 2005) termasuk di bidang pelayanan pariwisata.

3. Pengertian *Collaborative Governance*

Salah satu perangkat yang penting dalam istilah *collaborative governance* adalah "*governance*". Sudah banyak penelitian yang telah menghasilkan definisi *governance*, akan tetapi dalam defisi ini hanya sampai pada apa yang dapat di perbuat oleh pemerintah, namun belum secara menyeluruh. Pemerintah secara umum sebagai pembuat aturan, hukum, peradilan dan praktek-praktek administrasi didukung untuk menahan, mengonsep dan memacu penyediaan barang publik. Batasan tersebut memberikan ruang untuk struktur pemerintah tradisional dan hal tersebut membangun pengambilan kebijaksanaan secara publik atau swasta. pemerintah

mengarah pada aturan dan membuat arahan pengambilan keputusan bersama (dalam Dewi, 2012:09).

Ansell and Gash menjelaskan bahwa strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance*. Bentuk dari *governance* yang melibatkan berbagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama (Ansell dan Alison, 2007).

Ansell dan Gash menjelaskan *collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik. (Ansell & Gash, 2007)

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Gray bahwa kolaborasi merupakan suatu proses berfikir untuk menyelesaikan suatu masalah publik sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, swasta dan lain-lain (dalam Nanang, 2012:49)

Jonathan menjelaskan kolaborasi sebagai jalan diantara orang-orang yang saling berkelanjutan. Dari penjelasan diatas, pada prinsipnya kolaborasi merupakan bentuk interaksi, bekerja bersama, kompromi antara elemen yang

saling terkait baik organisasi, pribadi dan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung yang memperoleh akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang memulai sebuah proses kolaborasi merupakan cara yang sama, kesamaan pendapat, kemauan untuk berperoses, saling menguntungkan, kejujuran, kasih sayang serta berbasis publik. Konsep kolaborasi dipakai untuk mengilustrasikan hubungan kerja sama yang diperbuat pihak-pihak tertentu. Banyaknya penjelasan yang telah dikemukakan dengan sudut yang tidak sama namun didasari prinsip yang sama yaitu kebersamaan, bekerja bersama, membagi tugas, sama rata, dan akuntabilitas. Namun kolaborasi sangat sulit dideskripsikan dalam hal menggambarkan hakikat dari apa yang ada dalam kegiatan ini (dalam Tresiena, 2017).

Di lain pihak Stoker (dalam Ansell dan Gash 2012) mengemukakan bahwa penjelasan dasar, diambil bahwa *Governance* mengarah pada aturan dan pola yang memandu pengambilan keputusan bersama. Bahwa intinya adalah pada pengambilan keputusan dalam arti bersama bahwa pemerintah tidak berbicara tentang satu individu yang melahirkan keputusan akan tetapi tentang kelompok individu atau organisasi atau sistem organisasi yang melahirkan keputusan.

Kolaborasi berarti bekerja bersama atau bekerjasama dengan orang lain. Ini menyiratkan aktor individu, kelompok atau organisasi bekerjasama dalam usaha yang sama. Para aktor bekerjasama dengan yang lain dengan syarat dan ketentuan yang seperti kita ketahui dapat sangat bervariasi. Kata

“*collaboration*” pada awalnya digunakan pada abad kesembilan belas ketika perkembangan industrialisasi, organisasi yang lebih kompleks dan pembagian kerja dan tugas meningkat. Ini adalah norma dasar utilitarianisme, liberalisme sosial, kolektivisme, saling membantu dan kemudian manajemen ilmiah dan teori organisasi relasi manusia. Kolaborasi biasanya menarik “putaran” positif. Hal ini sering dilihat sebagai hal yang positif untuk berkolaborasi adalah lebih baik, kreatif, transformasional dan melibatkan hasil yang bermanfaat. Upaya kolaboratif dapat melibatkan pencapaian beberapa hasil atau hasil alternatif, negasi atau pencegahan sesuatu yang terjadi. Kita dapat berkolaborasi untuk tujuan “baik”. Terjadinya kolaborasi adalah penting sebagaimana sarana dan praktik yang terlibat, motivasi yang para pelaku, hasil yang diinginkan dan tujuan yang terlibat. (O’Flynn dan John, 2008:03).

Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung *stakeholder* di luar negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan publik dan program-program publik secara cepat (dalam Zaenuri, 2016).

Kolaborasi diartikan sebagai kerjasama antara individu, kelompok atau antar instansi dalam rangka mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai jika dilakukan secara independent. Dalam bahasa Indonesia, sebutan kolaborasi dan kerjasama masih digunakan secara bergantian dan belum terlihat usaha untuk menampilkan perbedaan dan kedalaman makna dalam sebutan tersebut.

Secara umum dikenal sebutan kerjasama dibandingkan kolaborasi, dan belum ada pemahaman yang lebih jauh tentang pola yang seharusnya digunakan.

Model *collaborative governance* berdasarkan empat variabel dikemukakan oleh (Ansel dan Gash, 2007) yaitu sebagai berikut: *conditions, institutional design, leadership, and collaborative process*. Kemudian terdapat tiga komponen penting dalam mendorong desain kelembagaan dan kepemimpinan yaitu; *time, task and target*.

Dalam kerjasama seperti ini, seluruh pihak-pihak yang melibatkan diri dalam kerjasama tetap memiliki otonominya sendiri. Para pihak yang berkolaborasi adalah prinsipal dan sekaligus juga bertindak sebagai agen untuk diri mereka sendiri. Mereka sepakat bekerjasama karena memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk diwujudkan secara bersama-sama yang mungkin akan sulit dicapai ketika masing-masing bekerja sendiri (dalam Dwiyanto, 2010:258).

Strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance*. bentuk dari *governance* yang melibatkan sebagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama. Sejalan dengan pengertian di atas juga menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada

konsensus deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik (dalam Irawan, 2016).

Beberapa ahli menggambarkan tahapan dari proses kolaborasi. Pendapat Gray (dalam Emerson dan Nabatchi, 2015:89) memberikan penjelasan mengenai tiga tahapan kolaborasi yaitu masalah pengaturan, penetapan arah serta pelaksanaan. Himmelan (dalam Emerson dan Nabatchi, 2015:89) tahapan kolaborasi dipandang sebagai suatu rangkaian strategi yang berkisar untuk merubah masyarakat melalui “*empowerment collaboration*” atau kolaborasi pemberdayaan.

Balogh, dkk (2012:02) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan 10 dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

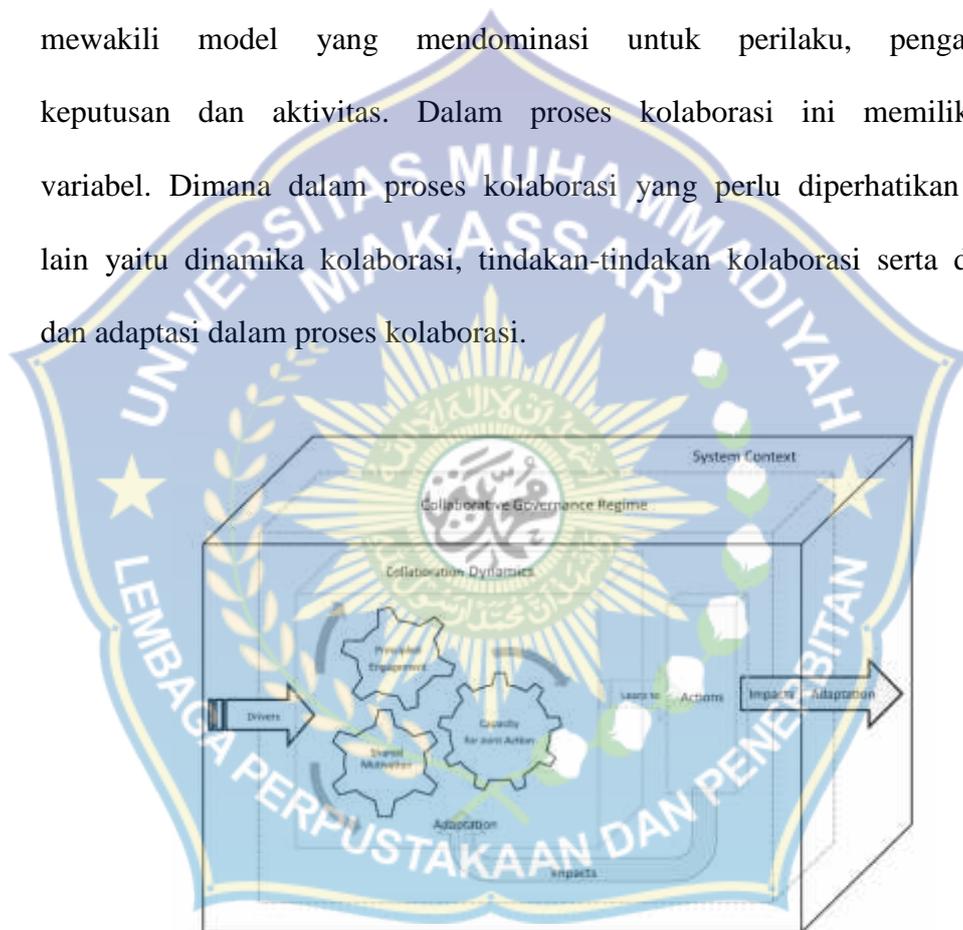
O’Leary Bingham dan Gerard (Balogh, dkk,2012:02) mendefenisikan bahwa *collaborative governance* merupakan sarana untuk mengendalikan proses yang mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam sektor swasta, publik dan masyarakat.

Collaborative Governance merupakan usaha serta respon yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik yang terjadi.

Dimana dalam penyelesaian masalah publik ini pemerintah harus melakukan kerjasama dengan aktor non pemerintah seperti pihak swasta, masyarakat dan lain-lain. (Sudarmo dan Mutiarawati, 2017).

4. Proses *Collaborative Governance*

Proses kolaborasi menunjukkan sebuah sistem yang dimana kolaborasi mewakili model yang mendominasi untuk perilaku, pengambilan keputusan dan aktivitas. Dalam proses kolaborasi ini memiliki tiga variabel. Dimana dalam proses kolaborasi yang perlu diperhatikan antara lain yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi serta dampak dan adaptasi dalam proses kolaborasi.



Gambar 2.1. Proses *Collaborative Governance*
(Sumber Balogh, dkk 2012)

Dinamika kolaborasi merupakan penggerak penting dalam proses kolaborasi. Pelaksanaan kolaborasi yang baik terdapat pada keterlibatan prinsip, motivasi bersama dan kapasitas untuk tindakan bersama.

Tindakan-tindakan kolaborasi merupakan cerminan dari dinamika kolaborasi. Dimana tindakan-tindakan kolaborasi tidak bisa dicapai bila hanya dilakukan oleh satu organisasi saja yang melakukan tindakan. Hasil dari tindakan kolaborasi biasanya dilihat sebagai dampak sementara yang mengarah kembali kepada dinamika kolaborasi.

Dampak dan adaptasi dalam proses kolaborasi yaitu dampak yang ditimbulkan dari proses kolaborasi. Karakteristik dampak dalam proses kolaborasi ada yang diharapkan dan tidak diharapkan. Dampak tersebut dapat menghasilkan umpan balik yang kemudian di adaptasi oleh kolaborasi. (Balogh, dkk 2012).

B. Konsep Pengelolaan Pariwisata

1. Pengeritan pariwisata

Methiesson dan Waill (dalam Nawawi, 2013) pariwisata merupakan pergerakan manusia yang sifatnya hanya sementara ke tujuan-tujuan wisata diluar tempat kerja dan tempat tinggal sehari-hari dimana aktivitasnya dilakukan selama tinggal di tempat tujuan wisata dan untuk itu disediakan fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan menurut Baiquni (dalam Nawawi, 2013) pariwisata dapat dimanfaatkan untuk mendorong perubahan hidup melalui peluang kerja yang tersedia, meningkatkan pendapatan dan membaiknya kualitas hidup masyarakat.

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor terbesar di dunia sebagai pembangkit ekonomi, namun keberadaan dari pariwisata sangat rentan terhadap bencana baik yang disebabkan oleh perilaku manusia maupun bencana yang disebabkan oleh alam. Menurut Henderson (dalam Zaenuri 2016) pariwisata merupakan industri yang selalu “dihantui” oleh bencana dan krisis, bahkan bias dikatakan sangat rentan karena mudah dipengaruhi oleh perubahan-perubahan maupun kejadian-kejadian yang ada disekelilingnya.

Pariwisata menurut pendapat dari Krapt dan Hunziker (dalam susilawati 2016) adalah keseluruhan dari gejala-gejala yang diakibatkan perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan orang asing itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang hanya sementara.

2. Tujuan Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan suatu objek wisata merupakan hal terpenting yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari itu pengelolaan haruslah dirancang secara matang agar tidak hasilnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pembangunan pariwisata harus melibatkan pemerintah, semua lapisan masyarakat, baik kalangan bawah maupun kalangan atas serta swasta. Semuanya diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata untuk menunjang pembangunan pariwisata. Masyarakat mempunyai dorongan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan apabila mereka mengetahui apa yang perlu mereka bantu dan mengapa harus ikut membantu. Mereka akan tertarik

untuk ikut serta menunjang pembangunan pariwisata apabila mereka telah paham akan mendapat manfaat yang positif. Suwanto (dalam Nawawi, 2013).

Tata kelola pariwisata yang baik merupakan tujuan serta cita-cita dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun swasta agar sektor pariwisata dapat semakin maju berkembang pesat. Pengelolaan suatu objek dan daya tarik wisata, memang tak lepas dari semua kegiatan yang dapat mendukung berkembangnya kepariwisataan. Menurut Darsoprajitno (dalam Hasanah 2017).

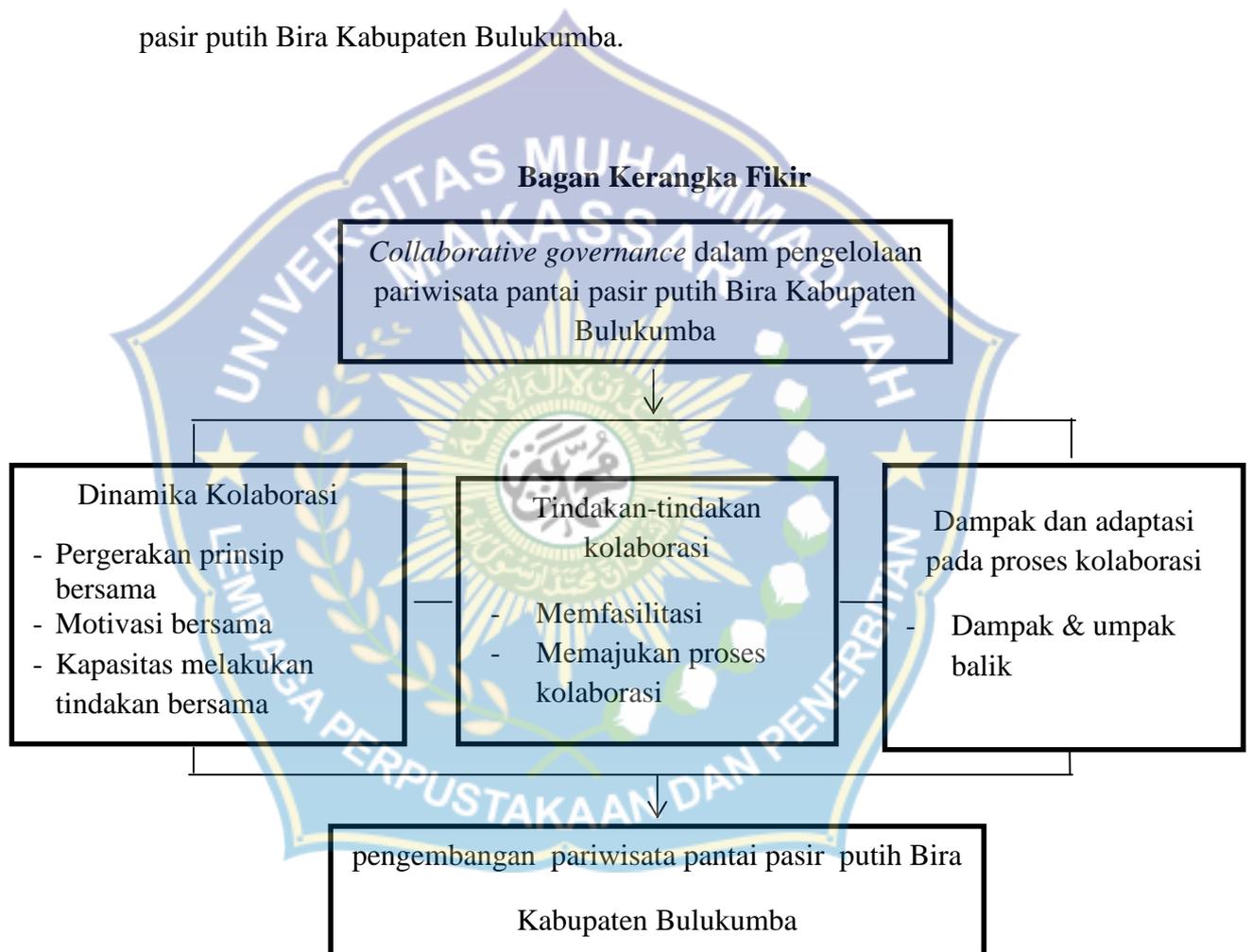
C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dari teori yang digunakan dalam penelitian serta hubungannya dengan perumusan masalah.

Mengacu pada konsep kolaborasi, bahwa kolaborasi adalah suatu upaya untuk menggabungkan semua sektor baik pemerintahan maupun non pemerintah untuk mengelola, menata dan mengatur semua urusan bersama guna mencapai hasil yang efektif dan efisien. Dari penjelasan diatas tersebut, maka dalam penelitian ini akan diuraikan *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira Kabupaten Bulukumba. Adapun termasuk dalam pengelolaan pariwisata tersebut adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta masyarakat kelompok sadar wisata (POKDARWIS). Dimana tiga proses dalam *Collaborative Governance* yaitu a) Dinamika

Kolaborasi, b) Tendakan-tindakan kolaborasi, c) Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi. (Balogh, dkk.2012).

Berdasarkan latar belakang dan teori-teori di atas maka kerangka penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan berikut ini dengan melihat beberapa indikator pada *Collabortive Governance* dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira Kabupaten Bulukumba.



Gambar 2.2 Kerangka Fikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih bira di Kabupaten Bulukumba, dengan tiga indikator utama yaitu:

1. Dinamika kolaborasi
2. Tindakan-tindakan kolaborasi
3. Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi Fokus Penelitian Guna memberikan keseragaman pengertian mengenai objek penelitian maka deskripsi fokus penelitian ini adalah proses pengelolaan kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan masyarakat kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam mengelola pantai pasir putih Bira, dengan tiga indicator utama yaitu:

1. Dinamika kolaborasi merupakan penggerak penting dalam proses kolaborasi dan memiliki sifat yang beubah-ubah. Kolaborasi yang baik terdapat dinamika. Didalam dinamika kolaborasi berfokus pada keterlibatan prinsip, motivasi bersama dan kapasitas untuk tindakan bersama dalam pengelolaan pantai pasir putih Bira Kabupaten Bulukumba
2. Tindakan-Tindakan Kolaborasi merupakan tindakan yang dilakukan dalam proses kolaborasi seperti tindakan memajukan proses kolaborasi dan kegiatan dilapangan guna membantu dalam pengelolaan pantai pasir putih Bira Kabupaten Bulukumba.

3. Dampak dan Adaptasi pada Proses Kolaborasi merupakan dampak yang ditimbulkan dari proses kolaborasi. Dampak tersebut dapat menghasilkan umpan balik yang kemudian di adaptasi dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira Kabupaten Bulukumba.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan setelah seminar proposal atau setelah surat perizinan telah dikeluarkan oleh pihak fakultas. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bulukumba dengan pertimbangan bahwa pengelolaan pariwisata di pantai Bira yang melibatkan kelompok sadar wisata belum maksimal dan di lokasi tersebut peneliti dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penelitian kali ini, penulis memilih untuk menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk memahami *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata. Kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan pariwisata. Penggunaan lebih dari satu pendekatan pengumpulan data memungkinkan evaluator menggabungkan kegiatan dan kebenaran dari suatu sumber data.

2. Tipe Penelitian

Pada tipe dalam penelitian ini adalah fenomenologi yang berfokuskan pada kolaborasi *stakeholder* dalam pengelolaan pariwisata. Tipe penelitian fenomenologi ini digunakan karena penelitian ingin mendapatkan gambaran

serta informasi yang sejelas-jelasnya mengenai pelaksanaan pengelolaan pariwisata dalam bentuk *collaborative governance*.

C. Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil, wawancara *observasi* atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu: *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih bira Kabupaten Bulukumba.
2. Data Sekunder adalah data yang didapatkan penulis dari Buku-buku, Beberapa dokumen berupa laporan-laporan tertulis dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan aspek-aspek keberhasilan pemerintah dalam mengelola pariwisata kabupaten bulukumba khususnya di pantai bira.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif prosedur pemilihan informan menurut Bugin (2007) adalah menggunakan “teknik *snowball sampling* dengan cara menentukan *key person* tertentu dengan sarat informasi sesuai dengan focus penelitian. *Key person* adalah orang yang mengerti dan bertindak sebagai pelaku di dalam objek penelitian.” Menurut Sugiyono (2012:219) “*snowball sampling* adalah tehnik pengumpulan sample sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang yang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.

Peneliti telah menetapkan informan dalam pelaksanaan penelitian ini dengan urutan informan yaitu :

Table 3.1. Informan Penelitian

No.	Nama	Inisial	Jabatan
1	Muh. Ali Saleng, SH.,M.Si	AS	Kepala Dinas Kabupaten Bulukumba
2	Andi Ayu Cahyuni, SH.,MH	AY	Kabag Pengembangan SDM Kepariwistaan
3	Andi Aryono, S.IP., MM	AR	Kasi Hubungan Kelembagaan Kepariwistaan
4	Mattotorang	MT	Ketua POKDARWIS
5	Samsir	SM	Anggoata POKDARWIS

E. Tehnik Pengumpulan Data

1. *Observasi* (Pengamatan langsung), yaitu pengumpulan data yang didapatkan dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan kolaborasi pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih bira di Kabupaten Bulukumba.
2. *Interview* (wawancara), dimana peneliti akan berkomunikasi dengan informan sehingga mendapatkan informasi-informasi sesuai dengan penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian dengan menyusun pedoman wawancara.
3. Dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data yang di ambil dari beberapa buku bacaan maupun dokumen dan yang lainnya berhubungan dengan objek penelitian di lokasi penelitian untuk melengkapi data tentang aspek-aspek keberhasilan pemerintah dalam mengelola pariwisata pantai pasir putih bira di Kabupaten Bulukumba.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2012:246) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai , sehingga datanya sudah jenuh. Hal-hal yang dilakukan dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Reduksi data (*data reduction*), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan memfokuskan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.

2. Penyajian data (*data display*). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

G. Keabsahan Data

Sugiyono (2012:270) Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut :

Triangulasi: pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan banyak waktu. Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada pada kantor

pemerintah dan lokasi objek wisata terkait *Collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja, sehingga data yang diperoleh dikantor pemerintah Kabupaten Bulukumba dan dari *stakeholder* yang berkolaborasi valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba terletak di Jasirah Sulawesi dan berjarak kurang lebih 153 kilometer dari ibukota Sulawesi Selatan Makassar antara 05° 20' - 05° 40' lintang selatan dan 119° 58' - 120° 28' bujur timur. Kabupaten Bulukumba yang diliputi 10 (sepuluh) kecamatan dan terbagi dalam 27 kelurahan dan 109 desa. Kecamatan terluas adalah kecamatan Gattareng dan Kecamatan Bulukumpa dengan masing-masing 173,51km² dan 171,53km² atau sekitar 30 persen dari luas total Kabupaten Bulukumba. Disusul oleh Kecamatan lainnya dan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ujungbulu yang merupakan pusat kota Kabupaten Bulukumba dengan luas 14,4 km² atau hanya sekitar 1 persen. Sedangkan Kecamatan Kindang adalah kecamatan tertinggi yaitu 100-1000 mpdl, sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan. Kabupaten Bulukumba juga diberi julukan "Butta Panrita Lopi" yang berarti tanah tempat kelahiran orang yang ahli dalam membuat perahu. Berbatasan dengan beberapa daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:

- 1) Disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- 2) Disebelah timur berbatasan dengan teluk Bone
- 3) Disebelah selatan berbatasan dengan laut Flores
- 4) Disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

Sebagaimana dengan Kabupaten/kota lainnya keberadaan kabupaten Bulukumba juga bersifat multifungsi sebagai pusat pemerintahan yang bersifat otonom, bisnis dan sebagai daerah tujuan wisata maka pengembangan kepariwisataan perlu dilakukan secara lebih terarah terencana dan terkoordinasi agar terhindar dari konflik kepentingan.

Kabupaten Bulukumba merupakan daerah yang beriklim tropis sehingga dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau dan diselingi oleh musim pancaroba. Suhu rata-rata berkisar antara 26,2'c-27,9'c dengan suhu maksimum berada pada bulan oktober dan suhu minimum berada pada bulan agustus dan September.

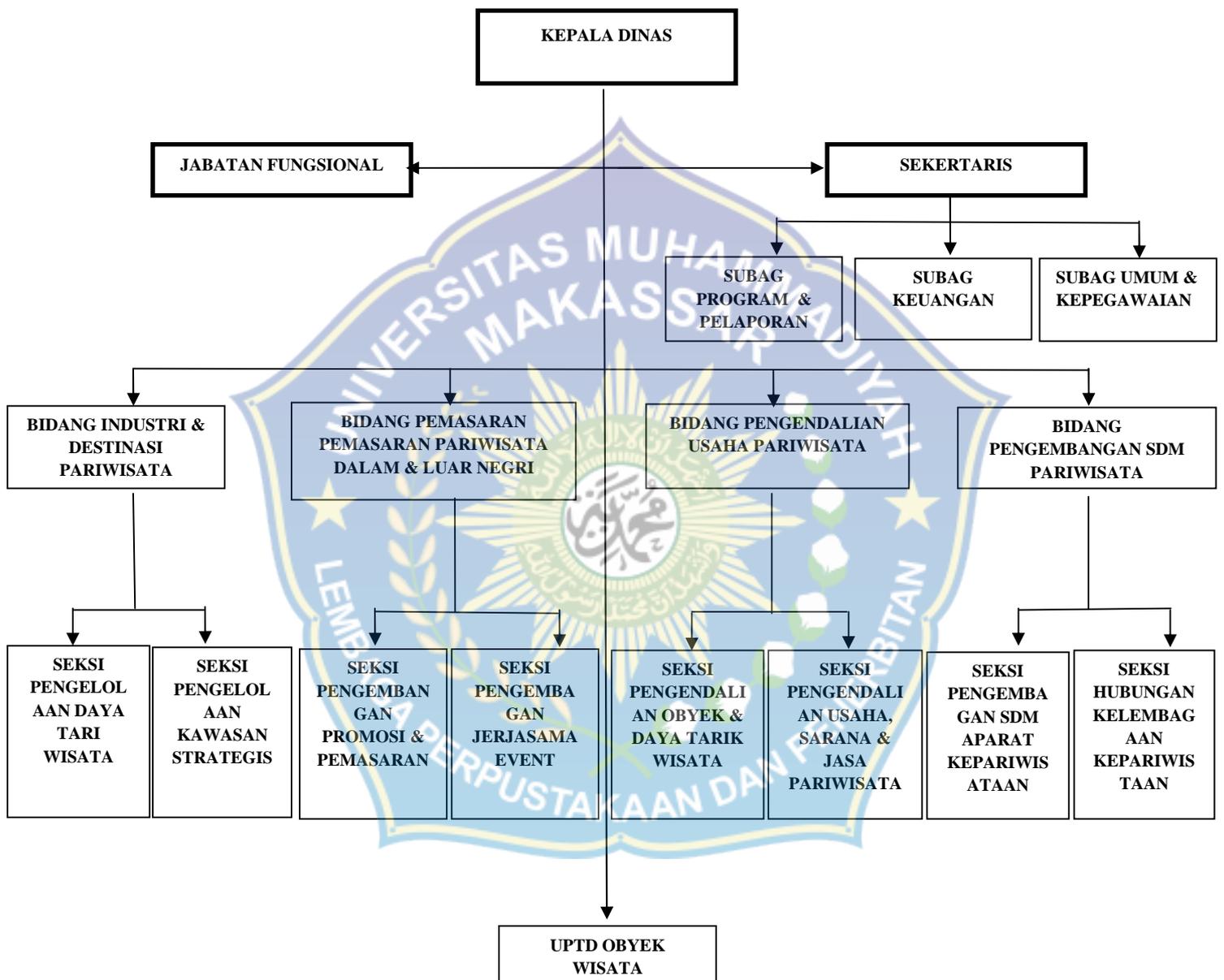
2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata

★ Pada tahun 1994 oleh bapak Bupati Bulukumba membentuk kantor pariwisata untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata yang ada di Bulukumba. Diakhir 2002 status kantor menjadi dinas dengan nama dinas perindustrian dan pariwisata seni budaya Kabupaten Bulukumba. Pada tahun 2008 kelembagaan kembali direvisi menjadi dinas kebudayaan dan pariwisata melalui Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 Tentang organisasi dan tata kerja dinas. Kemudian pada tahun 2016 direvisi kembali menjadi Dinas Pariwisata melalui Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

a) Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASIDINAS PARIWISATA

KABUPATEN BULUKUMBA



Gambar. 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba

(Sumber Dinas Pariwisata)

b) Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata

1) Kepala Dinas

- I. Kepala Dinas mempunyai tugas utama membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwistaan.
- II. Merumuskan rencana strategi Dinas Pariwisata.
- III. Mengendalikan kepariwistaan didaerah.
- IV. Mendistribusikan dan memberikan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas

2) Sekretariat

- I. Sekretariat mempunyai tugas utama membantu Kepala Dinas
- II. Memantau dan melakukan evaluasi tugas dan kegiatan bawahan.
- III. Menyusun hasil laporan pelaksanaan kegiatan.
- IV. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- I. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas utama membantu sekretariat dalam menyusun program.
- II. Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan dalam melakukan kegiatan.

III. Melaksanakan pemeliharaan barang/bahan/alat kelengkapan Dinas Pariwisata

IV. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan

4) Sub Bagian Keuangan

- I. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas utama membantu sekretariat menyusun program, petunjuk teknis.

- II. Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan.
 - III. Menggali sumber pendapatan asli daerah
 - IV. Menyusun realisasi perhitungan anggaran Dinas Pariwisata
 - V. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.
- 5) Sub Bagian Program
- I. Sub Bagian Program mempunyai tugas utama membantu sekretarian dalam menyusun program dan pelaporan hasil kegiatan
 - II. Mengumpulkan data dan informasi, tabulasi, pengolahan.
 - III. Menghimpun semua usulan program Dinas Pariwisata
 - IV. Menyusun hasil laporan kegiatan.
- 6) Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata
- I. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi pariwisata mempunyai tugas utama membantu Kepala Dinas menyediakan bahan penyusunan, pemantauan.
 - II. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata
 - III. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pengembangan pariwisata.
 - IV. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

7) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata

- I. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata mempunyai tugas utama membantu kepala Bidang menyiapkan penyusunan, pemantauan.
- II. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata
- III. Melaksanakan sinergitas pengembangan daya tarik wisata dengan kabupaten dan kotamadya serta stakeholder pariwisata lainnya
- IV. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan

8) Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata

- I. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang
- II. Menyusun rencana kegiatan
- III. Melaksanakan perencanaan, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata
- IV. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata
- V. Menyusun laporan hasil kegiatan

9) Bidang Pemasaran Dalam dan Luar Negeri

- I. Bidang Pemasaran Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas utama membantu kepala dinas melakukan penyusunan program kegiatan
- II. Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan
- III. Mengevaluasi berkala hasil kegiatan
- IV. Melakukan pelaporan mengenai hasil kegiatan

10) Seksi Sarana Pengembangan Promosi dan Pemasaran

- I. Seksi Sarana Pengembangan Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang menyiapkan bahan penyusunan kegiatan
- II. Melaksanakan pengelolaan sarana pengembangan promosi dan pemasaran
- III. Mengikuti pameran, event promosi pariwisata
- IV. Menyelenggarakan promosi melalui media elektronik dan cetak
- V. Menyusun hasil laporan kegiatan

11) Seksi Pengembangan Kerjasama, event dan Daya Tarik Wisata

- I. Seksi Pengembangan Kerjasama, event dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas utama membantu kepala bidang mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan
- II. Melakukan pengelolaan , pengembangan kerjasama dan pemasaran produksi kesenian kearifan lokal
- III. Menganalisa pola perjalanan/kunjungan wisatawan
- IV. Melakukan penyusunan hasil kegiatan

12) Bidang Pengendalian Obyek dan Usaha Pariwisata

- I. Bidang Pengendalian Obyek dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas utama membantu Kepala Dinas menyediakan bahan penyusunan pemantauan dan evaluasi
- II. Melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pemberian sanksi terhadap pelanggar objek dan usaha wisata

- III. Mengevaluasi data hasil kajian objek wisata dan daya tarik wisata
- IV. Melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsi
- V. Melakukan penyusunan laporan hasil kegiatan

13) Seksi Pengendalian Objek dan Daya Tarik Wisata

- I. Seksi Pengendalian Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas utama membantu kepala bidang menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi
- II. Melakukan pengendalian lengkungan pada objek pariwisata
- III. Mengevaluasi dan mengendalikan objek dan daya tarik wisata
- IV. Melakukan penyusunan laporan hasil kegiatan

14) Seksi Pengendalian Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata

- I. Seksi Pengendalian Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata mempunyai tugas utama membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan penyusunan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah
- II. Melakukan pembinaan serta pengendalian intern terhadap sarana usaha dan jasa pariwisata
- III. Menyediakan bahan dan melaksanakan proses penetapan kebijakan kendali mutu kegiatan
- IV. Menginventarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata
- V. Melakukan penyusunan laporan hasil kegiatan

15) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

- I. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas utama membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan penyelenggaraan kegiatan memantau serta mengevaluasi kegiatan
- II. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga kepariwisataan untuk pengembangan sumber daya pariwisata
- III. Menyiapkan bahan penyusunan, penerapan dan pengembangan serta pemantauan evaluasi pelaporan dan kerjasama pelaksanaan kompetensi sumber daya pariwisata
- IV. Melakukan pelaporan hasil kegiatan kepada atasan

16) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata

- I. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata mempunyai tugas utama membantu Kepala Bidang menyediakan bahan penyusunan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah
- II. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dalam rangka penerapan system sadar wisata dan sapta pesona pariwisata untuk mewujudkan sumber daya kepariwisataan yang kompeten dan berdaya saing
- III. Menyelenggarakan bimbingan dan pelatihan teknis tenaga kepariwisataan
- IV. Melakukan monitoring koordinasi dan evaluasi pemberdayaan masyarakat pariwisata

V. Menyusun laporan hasil kegiatan

17) Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata

- I. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata mempunyai tugas utama membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah
- II. Memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pariwisata dengan pelibatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat pariwisata
- III. Melakukan kerjasama dengan pemerintah desa, lembaga kepariwisataan serta lembaga lainnya guna pengembangan kepariwisataan
- IV. Menyusun laporan hasil kegiatan

18) Unit Pelaksana Teknis

- I. Untuk melakukan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas dapat dibentuk UPT
- II. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas utama melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
- III. Jumlah pejabat fungsional disesuaikan dengan kebutuhan
- IV. Jenis dan masa jabatan diatur sesuai dengan ketentuan

c) Visi Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba

1) Visi

“ Menggapai masyarakat sejahtera melalui pengembangan kepariwisataan (*tourism and culture development for prosperity*) dengan berlandaskan pada nilai religi dan kearifan lokal.

2) Misi

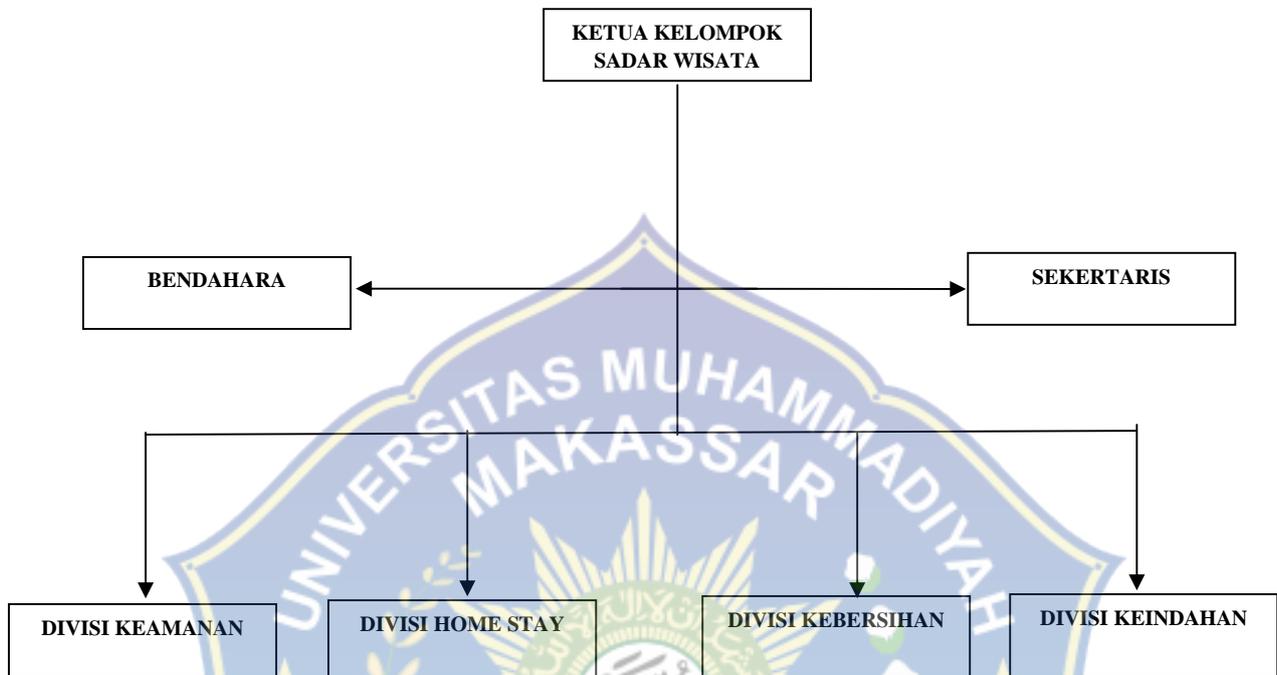
- I. Mengembangkan destinasi pariwisata potensial
- II. Menerapkan suatu system pemasaran yang inovatif dan bertanggung jawab
- III. Mengembangkan industri pariwisata untuk peningkatan ekonomi daerah
- IV. Mengembangkan kapasitas sumber daya kepariwisataan yang berdaya saing
- V. Mengembangkan tata kelembagaan yang akuntabel, transparansi, responsif

3. Gambaran Umum Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)

Kelompok sadar wisata yang selanjutnya disebut sebagai (POKDARWIS) merupakan kelembagaan ditingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap wisata yang berperan untuk menggerakkan dan mendukung terciptanya iklim kondusif serta berkembangnya kepariwistaanb dan menciptakan kondisi SAPTA PESONA wisata yang ada di kawasan pantai pasir putih Bira. menciptakan keramahtamahan kawsan pantai pasir putih Bira

a) **Struktur Organisasi Kelompok Sadar Wisata**

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK SADAR WISATA



*Gambar. 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba
(sumber kelompok sadar wisata)*

b) **Fungsi dan Tugas pokdarwis**

1) Fungsi

- I. Sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan wilayah pada destinasi wisata
- II. Sebagai mitra dari pemerintah dan pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan sadar wisata di daerah.

2) Tugas

I. Devisi Keamanan

- i. Menolong dan melindungi wisatawan
- ii. Menunjukkan rasa bersahabat terhadap wisatawan
- iii. Membantu memberi informasi kepada wisatawan

II. Devisi *Home Stay*

- i. Memberikan kenyamanan kepada wisatawan
- ii. Memberikan informasi kepada wisatawan
- iii. Menampilkan senyum yang tulus

III. Devisi kebersihan

- i. Menjaga kebersihan di lokasi wisata
- ii. Menjaga lingkungan dari polusi udara
- iii. Penampilan petugas yang rapi dan bersih

IV. Devisi keindahan

- i. Menjaga objek dan daya tarik wisata dalam tatanan yang estetik, dan alami
- ii. Menjaga keindahan tanaman hias dan penebih sebagai estetika keindahan yang mempunyai sifat alami.

4. Gambaran Umum Pantai Pasir Putih Bira

Pantai Tanjung Bira berjarak sekitar 42 km atau sekitar satu jam perjalanan dari ibu kota Bulukumba. Bira terletak di Kecamatan Bontobahari Desa Bira, daerah ini penghubung antara pulau Sulawesi dan Pulau Selayar.

Tak hanya memiliki pasir putih yang lembut akan tetapi biota laut yang terkandung tidak kalah menariknya untuk dilihat.

Dari pantai Bira, kita dapat melihat pulau Liuakang dan pulau Kambing. Selain itu di Bira Timur terdapat titik koordinat Geografis untuk menunjukkan titik garis pangkal garis lintang dan garis bujur suatu pulau. Disini pengunjung dapat menyaksikan keindahan *Sun Rise* di pagi hari dan *Sun Set* di sore hari diiringi oleh suara ombak yang menenangkan.

B. Hasil Penelitian dan pembahasan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Pantai Pantai Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba

Pariwisata akan baik jika dikelola secara bersama oleh karena itu dalam pengelolaan pariwisata perlu melibatkan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, lembaga swasta serta dukungan dari masyarakat. Untuk mengelola pariwisata pemerintah menginisiasi sebuah lembaga untuk terlibat dalam mengelola pariwisata dalam hal ini Kelompok Sadar Wisata inilah yang diidentifikasi sebagai bentuk kolaborasi.

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan pariwisata. Bab ini juga akan menjelaskan dengan memakai tiga proses kolaborasi Baligh dkk. (2012). a) Dinamika Kolaborasi, b) Tindakan-tindakan Kolaborasi, c) Dampak dan Adaptasi pada proses kolaborasi. Ketiga proses inilah yang menjadi dasar untuk menganalisis pembahasan pada bab ini dan akan diuraikan sebagai berikut.

1) **Dinamika Kolaborasi**

Dinamika Kolaborasi adalah penggerak penting pada kolaborasi. Dimana dalam melaksanakan proses kolaborasi yang baik terdapat dinamika kolaborasi didalamnya dan didalam dinamika kolaborasi terdapat pergerakan prinsip bersama, motivasi bersama serta kapasitas untuk melakukan tindakan secara bersama.

a) **Pergerakan Prinsip Bersama**

Pergerakan prinsip bersama dalam sebuah proses kolaborasi merupakan hal yang berlangsung secara berkelanjutan atau terus menerus dimana didalam pergerakan prinsip bersama terdapat sebuah tujuan yang sama dandan pihak lain sehingga harus dilakukan secara bersama agar tujuan dapat dicapai.

1. **Pengungkapan**

Proses kolaborasi terungkap bahwa dalam pengelolaan pariwisata memiliki kepentingan bersama dari pihak dalam melakukan kerjasama serta kepentingan untuk bergabung dalam kolaborasi. Dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira melibatkan pihak masyarakat dalam hal ini kelompok sadar wisata.

Pengungkapan yang dilakukan dalam pengelolaan pariwisata di pantai pasir putih Bira oleh para informan yang terkait, dilihat dari wawancara dibawah ini, sebagaimana diungkapkan oleh Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagai berikut.

“...dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira di Kabupaten Bulukumba kami sudah bekerjasama dengan pihak kelompok

Sadar Wisata, dan saya rasa memang dalam pengelolaan perlu yang namanya kerjasama dengan tujuan pengelolaan dapat mengoptimalkan sumberdaya alam serta meningkatkan daya saing pariwisata daerah, namun kelompok ini kurang aktif secara kelembagaan....”(hasil wawancara dengan “AY” pada tanggal 13 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira sudah cukup bagus karena dalam mencapai sebuah tujuan dalam pengelolaan sebuah objek pariwisata telah melibatkan masyarakat dalam hal ini kelompok sadar wisata. Karena dalam pengelolaan pariwisata tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja akan tetapi memerlukan keterlibatan dari pihak lain. Senada dengan pernyataan yang telah di ungkapkan oleh “AY” pernyataan yang sama juga di ungkapkan oleh informan lain. Peneliti pun melakukan wawancara kepada saudara “AS” selaku kepala Dinas Pariwisata. Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan tersebut.

“...dalam pengelolaan pariwisata pantai Bira kami disini bekerjasama dengan pihak kelompok sadar wisata agar pengelolaan bisa maksimal karena jika hanya Dinas Pariwisata saja yang mengelola pantai Bira saya rasa sulit untuk mengelola kawasan pantai pasir putih Bira...” (hasil wawancara dengan “AS” pada tanggal 13 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira pihak Dinas Pariwisata, Kelompok Sadar Wisata saling bekerjasama dalam pengelolaan pariwisata. Hal yang diungkapkan oleh salah satu informan ini dengan pernyataan dari ketua POKDARWIS. Berikut hasil wawancara sebagai berikut.

“...dalam pengelolaan pariwisata di pantai Bira pihak dari Dinas pariwisata bekerjasama dengan kami, dimana dulunya kami diikuti sertakan dalam kegiatan yang dilakukan namun sekarang sudah tidak

lagi ...” (hasil wawancara dengan “MT” pada tanggal 15 agustus 2018).

Berdasarkan dari hasil penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam pengungkapan pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira melibatkan pihak lain. Dimana dalam mengelola pantai pasir putih Bira pihak dari Dinas Pariwisata melakukan kerjasama dengan pihak Kelompok Sadar Wisata karena dalam pengelolaan pariwisata tidak bisa dilakukan secara sendiri akan tetapi memerlukan pihak lain. Namun fakta yang didapat kelompok sadar wisata sudah sudah jarang terlibat dalam pengelolaan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan pengungkapan pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan pariwisata di pantai Bira sudah cukup baik karena dalam pengungkapan pengelolaan sudah melibatkan elemen lain seperti pihak Dinas Pariwisata dan Kelompok Sadar Wisata. Karena dalam pengelolaan pariwisata tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja akan tetapi harus melibatkan pihak lain dalam pengelolaan pariwisata di pantai pasir putih Bira hal ini sejalan dengan teori Balogh dkk yang mengatakan bahwa Proses kolaborasi terungkap bahwa dalam pengelolaan pariwisata memiliki kepentingan bersama dari pihak dalam melakukan kerjasama serta kepentingan untuk bergabung dalam kolaborasi. Namun yang menjadi kendala kelompok sadar wisata sudah jarang diikuti sertakan karena secara kelembagaan mereka kurang aktif hal ini bisa dilihat dari anggota yang hanya fokus pada usahanya dan tidak lagi menjalankan tugasnya.

2. Deliberasi (diskusi bersama)

Melakukan sebuah kolaborasi harus memiliki landasan utama yaitu deliberasi karena hal ini dapat menunjang dalam proses kegiatan kolaborasi. Deliberasi dalam suatu proses kolaborasi adalah sebuah diskusi bersama dengan actor yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira Kabupaten Bulukumba.

Deliberasi yang dilakukan dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira oleh para pihak yang terkait dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini sebagaimana yang diungkapkan oleh kasi kelembagaan kepariwisataan, dasar dari dilakukannya kolaborasi sebagai berikut.

“....dalam sebuah proses kolaborasi sangat diperlukan yang namanya diskusi bersama dan hal itu memang kami lakukan bersama dengan pihak Kelompok sadar wisata dikarenakan kita tidak bisa melakukannya sendiri dengan permasalahan yang ada kita memang harus bekerjasama dengan pihak lain akan tetapi hal itu jarang kami lakukan kepada kelompok sadar wisata Bira karena kami lebih mengutamakan POKDARWIS yang aktif saja...”(hasil wawancara dengan “AR” pada tanggal 13 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira salah satu jalan yang ditempuh melalui deliberasi (diskusi bersama) akan tetapi hal ini jarang dilakukan karena Dinas pariwisata lebih mengutamakan POKDARWIS yang aktif, proses deliberasi pada kolaborasi adalah untuk menyelesaikan persoalan pengelolaan yang dilakukan melalui diskusi bersama dengan lembaga yang masuk dalam ruang lingkup pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira. Karena mengingat bahwa wisata pantai Bira memiliki berbagai persoalan sehingga dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira tidak dapat dilakukan

secara sendiri melainkan harus bekerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaannya. Hal ini senada dengan pernyataan dari anggota Kelompok Sadar Wisata mengenai landasan utama dalam melakukan kolaborasi sebagai berikut.

“.... Diskusi bersama untuk membicarakan hal-hal berkaitan dengan persoalan yang ada itu penting untuk pegembangkan kawasan pantai Bira akan tetapi hal itu jarang kami lakukan bersama dengan pihak Dinas Pariwisata...”(hasil wawancara dengan “SM” pada tanggal 15 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara yang dapat diketahui bahwa pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira salah satu hal yang penting untuk dilakukan adalah diskusi bersama untuk mendapatkan ide dan gagasan untuk pengembangan pariwisata namun hal ini harus selalu dilakukan untuk mengetahui perkembangan yang ada, karena proses deliberasi dalam kolaborasi adalah untuk menyelesaikan masalah pariwisata yang dilakukan melalui diskusi bersama dengan pihak yang berperan dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai deliberasi (diskusi bersama) dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih bira dapat disimpulkan bahwa salah satu jalan yang harus ditempuh adalah dengan melakukan deliberasi namun deliberasi (diskusi bersama) dalam kolaborasi pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira belum berjalan dengan baik disebabkan langkah yang ditempuh melalui diskusi jarang dilakukan karena Dinas Pariwisata lebih mengutamakan POKDARWIS yang aktif. Sedangkan teori yang dikemukakan oleh Balogh dkk bahwa sebuah

kolaborasi harus memiliki landasan utama yaitu deliberasi karena hal ini dapat menunjang dalam proses kegiatan kolaborasi. Proses deliberasi dalam kolaborasi adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam pariwisata yang dilakukan melalui diskusi bersama antara pihak yang berada dalam ruang lingkup pengelolaan pariwisata seperti pihak Dinas Pariwisata dan Kelompok Sadar Wisata. Diskusi yang dilakukan oleh kedua pihak bertujuan untuk menghasilkan ide serta solusi untuk pengembangan dan penyelesaian masalah yang ada jadi harus selalu dilakukan, karena mengingat hal ini tidak dapat diselesaikan jika hanya melibatkan pihak Dinas Pariwisata saja akan tetapi harus melibatkan pihak lain juga seperti pihak dari Kelompok Sadar Wisata dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira.

b) Motivasi Bersama

Motivasi bersama adalah sebuah dorongan atau sebuah kehendak yang dilakukan secara bersama-sama dalam menggapai tujuan tertentu. Dalam melakukan pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira seluruh pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi memiliki tujuan yang sama dan hendak dicapai.

1. Kepercayaan Bersama

Dalam sebuah kolaborasi kepercayaan bersama sangat penting karena proses pengelolaan tidak hanya melibatkan satu pihak saja akan tetapi melibatkan pihak lain sehingga dalam pengelolaannya kepercayaan kepada semua pihak harus ada untuk memperlancar kolaborasi yang dilakukan dalam

pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira. Kepercayaan bersama sangat dibutuhkan oleh setiap lembaga yang memiliki kepentingan untuk menunjang kelancaran proses kolaborasi yang baik seperti hasil wawancara dengan salah satu informan kasi kelembagaan kepariwisataan sebagai berikut:

“....saya kira dalam pengelolaan kepercayaan itu sangat penting karena kita ini melakukan kerjasama, artinya mereka harus tahu bagaimana pengembangan pariwisata itu mulai dari bawah ke atas ataupun dari atas kebawah akan tetapi sekarang kami sudah jarang menyampaikan sesuatu kepada pihak dari kelompok sadar wisata karena mereka yang kurang aktif dalam pengelolan ini....”(hasil wawancara dengan “AR” pada tanggal 13 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kepercayaan dengan pihak lain sangat penting dalam melakukan kolaborasi karena tanpa adanya kepercayaan antara pihak yang melakukan kolaborasi maka kolaborasi tidak akan berjalan dengan baik. Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan ketua Kelompok Sadar Wisata sebagai berikut:

“....iya memang kepercayaan dalam sebuah kerjasama itu harus ada, misal setiap ada kegiatan-kegiatan ada konfirmasi serta penyampaian atau kita bertanya tentang pengembangan pariwisata apa yang baik untuk dilakukan akan tetapi itu dulu sekarang sudah tidak lagi...”(hasil wawancara dengan”MT” pada tanggal 15 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kolaborasi pengelolaan pariwisata kepercayaan itu penting akan tetapi bila pihak yang melakukan kolaborasi dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kelompok Sadar Wisata tidak saling mempercayai lagi maka kolaborasi tidak akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai kepercayaan bersama dapat diketahui bahwa dalam proses kolaborasi kepercayaan itu sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira. Karena kolaborasi tanpa adanya rasa saling percaya satu sama lain antara pihak yang berkerjasama maka proses kolaborasi tidak akan berjalan dengan baik. Kepercayaan bersama antara pihak dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira belum baik karena seiring berjalannya waktu kepercayaan antara kedua pihak memudar dikarenakan kurangnya pembagian informasi serta jaranganya diskusi sehingga proses kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira tidak lagi berjalan dengan baik. Hal ini tidak berbanding lurus dengan teori yang digunakan bahwa Dalam sebuah kolaborasi kepercayaan bersama sangat penting karena proses pengelolaan tidak hanya melibatkan satu pihak saja akan tetapi melibatkan pihak lain sehingga dalam pengelolaannya kepercayaan kepada semua pihak harus ada untuk memperlancar kolaborasi yang dilakukan.

2. Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama antara semua pihak yang bekerja sama iyalah dengan saling mengerti dan menghargai perbedaan dalam melakukan kolaborasi pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira. Pemahaman bersama pada kolaborasi sering dipengaruhi oleh sikap percaya yang telah dibentuk dalam kolaborasi. Hasil wawancara dengan salah satu informan kabag pengembangan sumber daya kepariwisataan sebagai berikut.

“...membangun pemahaman bersama itu memang dibutuhkan agar kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dulu hal yang kami lakukan untuk membangun pemahaman dengan melakukan komunikasi serta mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan juga menghargai tugas masing-masing. Akan tetapi pihak dari Kelompok Sadar Wisata ini secara kelembagaan kurang aktif lagi sehingga komunikasi kami tidak terjalin lagi dengan baik...”(hasil wawancara dengan”AY” pada tanggal 13 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam membangun pemahaman bersama dengan pihak kelompok sadar wisata hal yang dilakukan dengan melakukan komunikasi serta mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan juga menghargai tugas masing-masing akan tetapi hal ini tidak berjalan dengan baik dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira karena kelompok sadar wisata di Bira tidak aktif dan Dinas Pariwisata lebih mengutamakan kelompok sadar wisata yang aktif. Hasil wawancara dengan salah satu informan Ketua Kelompok Sadar wisata sebagai berikut:

“...kami selalu berupaya untuk membangun pemahaman bersama dengan pihak Dinas Pariwisata dengan saling bekerjasama mengelola pantai Bira dan saling menghargai tugas masing-masing. Akan tetapi sekarang kami merasa tidak dihargai karena pihak dari Dinas Pariwisata tidak pernah lagi melakukan komunikasi dengan kami sehingga komunikasi kami tidak berjalan dengan baik...”(hasil wawancara dengan “MT” pada tanggal 15 Agustus 2019)

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa untuk membangun pemahaman bersama dengan pihak Dinas Pariwisata dengan saling bekerjasama dan menghargai tugas masing-masing akan tetapi komunikasi tidak baik sehingga proses kolaborasi tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pemahaman bersama dapat diketahui bahwa dalam berkolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih bira pihak Dinas Pariwisata berupaya membangun pemahaman bersama dengan pihak kelompok sadar wisata untuk menjaga hubungan dengan baik serta kepercayaan antara pihak yang berkolaborasi dengan melakukan komunikasi dan evaluasi mengenai kegiatan yang telah dilakukan akan tetapi ketidakaktifan dari kelompok sadar wisata membuat komunikasi antar keduanya tidak baik sehingga kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pantai Bira tidak berjalan dengan baik. Dengan demikian hal ini belum sejalan dengan teori dari Balogh dkk yang mengatakan bahwa Pemahaman bersama antara semua pihak yang bekerjasama iyalah dengan saling mengerti dan menghargai perbedaan.

3. Legitimasi Internal

Legitimasi internal adalah kondisi yang menunjukkan bahwa pihak-pihak kolaborasi dapat dipercaya dalam melakukan tugasnya masing-masing. Legitimasi internal dalam aturan hukum benar-benar telah melakukan tugasnya serta yang terlibat didalamnya sudah kuat. Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan selaku kasi kelembagaan kepariwisataan sebagai berikut:

“...legitimasi internal kami dalam pengelolaan pariwisata sesuai dengan aturan yang ada yaitu Perbub. Dan ketika kami ingin melakukan sebuah kegiatan kami juga memiliki SOP...”(hasil wawancara dengan”AR” pada tanggal 13 Agustus 2019).

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh informan bahwa dalam mengelola pariwisata pantai pasir putih Bira legitimasi internal berdasarkan kepada aturan yaitu Perbub Nomor 188 tahun 2019 tentang Penetapan Desa Wisata Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba. Dan peran bawahan sudah baik karena sudah berdasar pada struktur dan prosedur. Begitupun yang diungkap oleh salah satu informan sebagai ketua Kelompok Sadar Wisata sebagai berikut:

“...dalam pengelolaan pariwisata kita mengacu pada aturan dari Dinas Pariwisata yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Pariwisata jadi itulah yang kami ikuti...”(hasil wawancara dengan”MT” pada tanggal 15 Agustus 2019).

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa legitimasi internal dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira berdasarkan aturan SK Kepala Dinas Pariwisata yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai legitimasi internal dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira mengacu pada Perbub Nomor 188 tahun 2019 tentang Penetapan Desa Wisata Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba, serta SK Kepala Dinas Pariwisata yang telah ditetapkan. Peran bawahan sudah baik karena berdasar pada prosedural yang telah ditetapkan dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira. Hal ini sesuai dengan teori Balogh dkk dimana legitimasi internal adalah kondisi yang menunjukkan bahwa pihak-pihak kolaborasi dapat dipercaya dalam melakukan tugasnya masing-masing dan dalam aturan hukum benar-benar telah melakukan tugasnya

4. Komitmen

Komitmen dalam sebuah kolaborasi penting dan sangat dibutuhkan karena dalam melakukan tindakan harus memiliki komitmen dengan jelas agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan bersama dapat dicapai. Wawancara yang dilakukan kepada salah satu informan yang terkait bisa dilihat dibawah ini, sebagaimana yang dikatakan oleh kepala Dinas bahwa kerjasama yang dilakukan dengan pihak Kelompok Sadar Wisata sebagai berikut:

“...kami dalam melakukan kerjasama dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira komitmen kami berpatokan pada aturan yang telah disepakati yaitu SK Kepala Dinas Pariwisata tapi karena kelompok sadar wisata yang ada di Bira kurang aktif maka sekarang ini dalam pengelolaan mereka tidak terlalu terlibat lagi ...”(hasil wawancara dengan "AS" pada tanggal 13 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa komitmen dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira berpatokan pada aturan yaitu SK Kepala Dinas Pariwisata namun karena pihak dari kelompok sadar wisata kurang aktif sehingga kerjasama yang dilakukan tidak berjalan dengan baik lagi. Hal yang sama disampaikan oleh salah satu informan anggota Kelompok Sadar Wisata sebagai berikut:

“....selama ini dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih bira komitmen kami adalah berusaha untuk mempertahankan kerjasama dengan pihak Dinas pariwisata agar kerjasama ini tidak kendor namun sekarang ini kami sudah sangat jarang dilibatkan dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira sehingga kami merasa tidak dianggap lagi....”(hasil wawancara dengan "SM" pada tanggal 15 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira pihak dari Kelompok Sadar Wisata berusaha untuk mempertahankan kerjasama dalam pengelolaan pariwisata agar tidak kendor akan tetapi kelompok sadar wisata merasa tidak dianggap lagi sehingga mereka kurang aktif dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada kelompok sadar wisata dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai komitmen dapat disimpulkan bahwa komitmen dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira pihak yang melakukan sesuai aturan yaitu SK Kepala Dinas dan berusaha untuk mempertahankan kerjasama agar tidak kendor, namun kedua pihak yang bekerjasama belum menjaga komitmen yang ada dengan kuat sehingga pada kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata belum berjalan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan teori Balogh karena Komitmen dalam sebuah kolaborasi penting dan sangat dibutuhkan karena dalam melakukan tindakan harus memiliki komitmen dengan jelas agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan bersama dapat dicapai.

c) Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

Kapasitas melakukan tindakan bersama dalam pengelolaan pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan kerjasama antara pihak yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira. Setiap pihak memiliki kapasitasnya masing-masing dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama.

1. Prosedur dan Kesepakatan Bersama

Prosedur dan kesepakatan bersama merupakan salah satu fitur yang penting yang meliputi aturan-aturan serta keputusan yang dibuat melalui kesepakatan bersama. Prosedur dan kesepakatan bersama dalam melakukan kolaborasi pada pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira kepada para informan yang terkait dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan dibawah ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh kabag pengembangan sumber daya kepariwisataan sebagai berikut:

“....prosedur kami dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira dengan pihak lain mengacu pada aturan SK Kepala Dinas Pariwisata dan dalam pelaksanaannya bagaimana kami dari pihak Dinas Pariwisata mengelola pantai Bira dengan baik....”(hasil wawancara dengan “AY” pada tanggal 13 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam kolaborasi pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira mengacu pada aturan SK Kepala Dinas Pariwisata yang telah ditentukan hasil wawancara ini didukung oleh pernyataan salah satu informan ketua Kelompok Sadar Wisata sebagai berikut:

“....jadi begini de’ kami dalam melakukan kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira prosedurnya itu berdasar pada aturan yaitu SK Kepala Dinas Pariwisata yang telah ditentukan....”(hasil wawancara dengan “MT” pada tanggal 15 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa prosedur dan kesepakatan bersama dalam kolaborasi pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira berdasar pada Sk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai prosedur dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira Kabupaten Bulukumba. Dimana dalam kolaborasi antara pihak Dinas Pariwisata dengan pihak Kelompok Sadar Wisata mengacu pada keputusan yang dibuat oleh Kepala Dinas Pariwisata dalam Bentuk SK Kepala Dinas Pariwisata. Hal ini selaras dengan teori yang digunakan dari Balogh dkk bahwa Prosedur dan kesepakatan bersama merupakan salah satu fitur yang penting yang meliputi aturan-aturan serta keputusan yang dibuat melalui kesepakatan bersama.

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan bisa diartikan sebagai suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam dalam melakukan pekerjaan yang telah diberikan kepada mereka. Kepemimpinan sendiri memiliki peran sebagai pihak yang menggali dukungan untuk melakukan kolaborasi, mediator dan fasilitator dan melakukan advokasi terhadap masyarakat. Sebagaimana pernyataan yang diberikan oleh salah satu informan Kasi Kelembagaan Kepariwisata sebagai berikut:

“...tentu dalam melaksanakan pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira peran kami begitu penting dalam mengarahkan kelompok darwis serta masyarakat karena kami sebagai instansi yang memiliki tugas dalam pengelolaan pariwisata dan disamping itu kami membutuhkan dukungan serta kerjasama dari pihak lain untuk melaksanakan pengelolaan pariwisata di pantai Bira. Tetapi dukungan dari masyarakat masih kurang jadi itu yang menjadi persoalan...”(hasil wawancara dengan “AR” pada tanggal 13 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kepemimpinan begitu penting dalam mengarahkan, sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola pariwisata pantai pasir putih Bira, serta dalam pengelolaan kami juga membutuhkan kerjasama dari pihak lain dalam pengelolaannya namun ketika dukungan dari pihak lain kurang hal itu menjadi persoalan bagi pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira. Hal yang diungkap dari hasil wawancara dari salah satu informan Ketua Kelompok Sadar Wisata sebagai berikut:

“...kami selaku pihak yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira diberikan tanggungjawab untuk menciptakan SAPTA PESONA di kawasan Bira dan juga tugas kami disini bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sadar wisata. Namun hal ini sekarang kami tidak jalankan lagi karena alasan sama seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kelompok ini seakan-akan tidak dianggap lagi jadi kami juga tidak menjalankan tugas dengan baik...”(hasil wawancara dengan “MT” pada tanggal 15 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan pariwisata pantai bira kami bertanggung jawab untuk menciptakan SAPTA PESONA guna terciptanya lingkungan yang kondusif dan berkembangnya kegiatan kepariwistaan dikawasan pantai Bira serta memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar wisata. Namun tidak dijalankan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kepemimpinan dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan pariwisata masyarakat memiliki peran penting agar pengelolaan

bisa berjalan dengan baik. Pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira saat ini belum berjalan dengan baik, dimana Dinas Pariwisata sebagai instansi yang seharusnya berperan dalam mengarahkan dan mengontrol pihak lain belum bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga pihak yang terlibat kelompok sadar wisata dalam menjalankan tanggungjawab yang diberikan belum dijalankan berjalan baik. Hal belum sejalan dengan teori yang digunakan dari Balogh dkk bahwa kepemimpinan bisa diartikan sebagai suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam dalam melakukan pekerjaan yang telah diberikan kepada mereka

3. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang dibutuhkan oleh pihak untuk ikut berpartisipasi dalam proses kolaborasi. Pengetahuan adalah informasi yang telah dipahami oleh actor, sehingga akan berguna bagi mereka dalam melakukan sebuah kolaborasi dengan banyak pihak. Hasil wawancara dengan salah satu informan Kasi Kelembagaan Kepariwisata sebagai berikut:

“....pada saat kami melakukan kolaborasi ini dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira kami memberikan pelatihan-pelatihan arahan dan informasi yang menyangkut pengelolaan, namun untuk sekarang ini hal itu cuma kami lakukan untuk kelompok-kelompok yang aktif saja....”(hasil wawancara dengan “AR” pada tanggal 13 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira pemberian arahan dan informasi berupa tugas dan informasi mengenai perkembangan pariwisata hanya

dilakukan kepada Kelompok Sadar Wisata yang aktif di lokasinya masing-masing, hal ini diperkuat oleh salah satu informan pada wawancara Kabag Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata sebagai berikut:

“....tentu pengetahuan itu penting untuk kolaborasi untuk pengembangan SDM penggerak kepariwisataan di daerahnya itu kami berikan informasi serta arahan-arahan. Untuk saat ini kami lebih utamakan POKDARWIS yang aktif di daerahnya masing-masing....”(hasil wawancara dengan “AY” pada tanggal 13 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pemberian informasi dan arahan dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira lebih diutamakan untuk Kelompok Sadar Wisata yang aktif. Yang dikatakan oleh salah satu informan Ketua Kelompok Sadar Wisata sebagai berikut:

“....awalnya memang dalam kolaborasi pada pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira pada saat ada kegiatan kami diberikan informasi serta arahan-arahan agar pada saat ingin melakukan sesuatu kami sudah punya pengetahuan. Namun sekarang hal itu tidak lagi dilakukan sehingga kami tidak punya informasi mengenai pengelolaan pariwisata jadi kami merasa dikesampingkan....”(hasil wawancara dengan “MT” pada tanggal 15 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan salah satu informan dapat diketahui bahwa kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira pemberian informasi serta arahan kepada pihak yang melakukan kolaborasi masih kurang sehingga proses kolaborasi tidak mengalami kemajuan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas tentang pengetahuan dapat disimpulkan bahwa dalam kolaborasi pengelolaan pantai pasir putih Bira pemberian informasi mengenai tugas dan perkembangan pariwisata serta arahan-arahan mengenai apa yang harus dilakukan agar proses kolaborasi bisa berjalan dengan baik belum maksimal dan cenderung mengesampingkan Kelompok Sadar Wisata Bira karena dianggap kurang aktif dalam pengelolaan pantai pasir putih Bira. Hal ini belum sejalan dengan teori yang digunakan dari Balogh dkk Pengetahuan adalah informasi yang dibutuhkan oleh pihak untuk ikut berpartisipasi dalam proses kolaborasi. Pengetahuan adalah informasi yang telah dipahami oleh aktor, sehingga akan berguna bagi mereka dalam melakukan sebuah kolaborasi dengan banyak pihak.

4. Sumber Daya

Kolaborasi membutuhkan sumber daya, karena sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh unsur tertentu dalam sebuah kehidupan. Sumber daya bukan hanya yang berwujud secara fisik akan tetapi nonfisik juga dikatakan sebagai sumber daya. Sumber daya yang dimiliki bisa berkembang menjadi semakin besar namun juga bisa hilang, namun ada sumber daya yang abadi dan akan selalu ada. Sumber daya dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dalam wawancara sebagai berikut:

“....dalam melakukan sebuah kolaborasi sumber daya itu sangat dibutuhkan agar pengelolaan ini bisa berjalan dengan baik, jadi setiap ada kegiatan tentu kami melakukan pertemuan untuk membahas mengenai pembagain peran dan waktu secara merata agar berjalan

dengan semestinya, kalau untuk di Bira karena Kelompok Sadar Wisata disana itu kurang aktif jadi kami sudah jarang melibatkan mereka....”(hasil wawancara dengan “AS” pada tanggal 13 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam kolaborasi pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira pihak dari Dinas Pariwisata sudah jarang melibatkan Kelompok Sadar Wisata Bira karena kurang aktif berpartisipasi. Hal yang disampaikan oleh salah satu informan anggota Kelompok Sadar Wisata pada wawancara sebagai berikut.

“....sebenarnya kami selalu bersedia untuk berpartisipasi pada setiap kegiatan yang dilakukan pihak dari Dinas Pariwisata di pantai Bira ketika ada arahan yang diberikan, akan tetapi tidak pernah lagi ada pertemuan dengan kami untuk membahas mengenai pembagian tugas atau pendampingan jadi kami merasa tenaga kami seakan-akan tidak dibutuhkan....” Hasil wawancara dengan “SM” pada tanggal 15 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sumber daya dari pihak Kelompok Sadar Wisata Bira selalu bersedia untuk berpartisipasi pada proses kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira akan tetapi karena tidak adanya pendampingan serta pertemuan untuk membahas pembagian peran sehingga tidak adanya partisipasi lagi dari pihak Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Bira sekarang ini.

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai sumber daya kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira dapat diambil kesimpulan bahwa sumber daya dalam pembagian peran dan waktu tidak terbentuk karena dapat dilihat dari fakta bahwa pihak yang bekerjasama tidak

pernah lagi melakukan pertemuan untuk membahas hal itu ketika ada kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini belum sesuai dengan teori Balogh dkk karena Kolaborasi membutuhkan sumber daya, karena sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh unsur tertentu dalam sebuah kehidupan. Sumber daya bukan hanya yang berwujud secara fisik akan tetapi nonfisik juga dikatakan sebagai sumber daya.

2) Tindakan-tindakan Kolaborasi

Tindakan-tindakan kolaborasi pada prakteknya sangatlah bermacam-macam apapun bentuk yang dilakukan baik dalam wujud kegiatan sosialisasi maupun bimtek yang dilakukan oleh pihak yang berkolaborasi.

a) Memfasilitasi

Memfasilitasi pada proses kolaborasi merupakan cara untuk mempermudah dan melancarkan pelaksanaan kolaborasi. Memfasilitasi adalah sebuah kegiatan yang dapat menjelaskan suatu pemahaman, keputusan serta tindakan yang dilakukan secara individual atau bersama dengan orang lain dengan tujuan mempermudah tugas yang dijalankan. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu informan Kabag Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dalam wawancara sebagai berikut:

“....pihak kami biasa memfasilitasi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menumbuhkan kesadaran wisata, kami juga melakukan bimtek kepada kelompok sadar wisata Bira. Namun kami akui bahwa hal ini jarang kami lakukan apalagi sekarang kelompok sadar wisata disana kurang aktif....”(hasil wawancara dengan “AY” pada tanggal 13 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa sosialisasi mengenai peran dan kontribusi diberikan kepada masyarakat agar kesadaran mereka terhadap wisata dapat bertumbuh, serta memberikan bimbtek kepada POKDARWIS agar anggotanya dapat berkompeten. Namun hal itu jarang dilakukan apalagi sekarang ini Kelompok Sadar Wisata yang ada di Bira sudah kurang aktif. Hal yang diungkapkan oleh salah satu informan Ketua Kelompok Sadar Wisata pada wawancara berikut ini:

“...begini de’ dalam memfasilitasi niminal kami menyumbang tenaga kalau ada kegiatan, juga mengirim anggota untuk menghadiri pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka yang nantinya mereka memberikan kepada masyarakat...”(hasil wawancara dengan “MT” pada tanggal 15 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam memfasilitasi kolaborasi pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira dengan menyumbangkan tenaga serta mengirim anggota untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan kemampuan mereka dan nantinya memberikan edukasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai peran dalam memfasilitasi kolaborasi pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira guna memperlancar dan mempermudah proses kolaborasi yang dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran dan kontribusi terhadap kepariwistaan serta memberikan bimtek atau pelatihan kepada pihak Kelompok Sadar Wisata untuk meningkatkan kemampuan dalam hal pengelolaan pariwisata tetapi hal ini belum maksimal karena jarang

dilakukan. Teori dari Balogh dkk belum sepenuhnya berjalan karena memfasilitasi pada proses kolaborasi merupakan cara untuk mempermudah dan melancarkan pelaksanaan kolaborasi. Memfasilitasi adalah sebuah kegiatan yang dapat menjelaskan suatu pemahaman, keputusan serta tindakan yang dilakukan secara individual atau bersama dengan orang lain dengan tujuan mempermudah tugas yang dijalankan sedangkan hal ini belum maksimal karena jarang dilakukan.

b) Memajukan Proses Kolaborasi

Dalam upaya memajukan proses kolaborasi dengan merangkul seluruh pihak yang berperan dalam hal pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira dan bisa menjaga kerjasama yang telah dijalin agar keadaan yang lebih baik dan membangun proses kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira bisa lebih berkembang lagi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu informan Kabag pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dalam wawancara sebagai berikut:

“.... Kami berusaha untuk menjalin komunikasi dengan melakukan pertemuan dalam upaya memajukan kolaborasi. Saat ini kami akui belum efektif karena komunikasi kami dengan pihak Kelompok Sadar Wisata tidak berjalan dengan baik dan kami jarang melakukan pertemuan untuk membicarakan masalah pengelolaan di kawasan pantai Pasir putih Bira....”(hasil wawancara dengan “AY” pada tanggal 13 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa upaya dalam memajukan proses kolaborasi seperti merangkul dan menjaga kerjasama dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira belum efektif

karena komunikasi tidak berjalan dengan baik dan kedua pihak tidak melakukan pertemuan untuk membahas serta bertukar pendapat mengenai pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira. Hal yang sama disampaikan oleh salah satu informan anggota Kelompok Sadar Wisata dalam wawancara berikut ini:

“.... Upaya kami adalah berusaha terbuka untuk bertukar pendapat ketika ada komunikasi kepada kami dari Dinas pariwisata. Namun komunikasi kami tidak terjalin dengan baik sehingga upaya yang dilakukan belum efektif untuk memajukan kolaborasi ini....”(hasil wawancara dengan “SM” pada tanggal 15 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam memajukan proses kolaborasi upaya yang dilakukan adalah berusaha terbuka satu sama lain seperti memberitahu rencana yang akan dilakukan dan ingin dicapai namun komunikasi yang tidak terjalin dengan baik sehingga upaya ini belum efektif dalam memajukan proses kolaborasi pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai memajukan proses kolaborasi dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pihak yang bekerjasama untuk memajukan kolaborasi dengan berusaha saling terbuka seperti memberitahu rencana yang akan dilakukan dan ingin dicapai serta mengadakan pertemuan. Namun belum efektif karena komunikasi antara pihak yang bekerja sama tidak terjalin dengan baik dan jarang melakukan pertemuan sehingga upaya untuk memajukan kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira belum efektif. Teori dari Balogh dkk belum

sepenuhnya berjalan pada memajukan proses kolaborasi di Pantai Bira karena dalam teori Balogh dkk dalam upaya memajukan proses kolaborasi dengan merangkul seluruh pihak yang berperan dalam hal pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira dan bisa menjaga kerjasama yang telah dijalin agar keadaan yang lebih baik dan membangun proses kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata dan hal ini belum terwujud.

3) Dampak dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi

Dalam proses penelitian yang dilakukan akhirnya akan memberikan dampak. Dari berbagai dampak tentu akan menghasilkan *feedback* atau umpan balik, dan akan diadaptasi oleh kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud iyalah bagaimana kolaborasi menyikapi umpan balik dari masing-masing pihak yang terlibat. Hal yang diungkapkan dari hasil wawancara dengan salah satu informan Kasi Kelembagaan kepariwisataan sebagai berikut:

“.....mengelola pariwisata itu sulit ketika kita sendiri yang melakukannya karena pada dasarnya banyak hal yang harus dilakukan dan dengan sumber daya yang kurang maka kita harus melakukan kolaborasi dengan pihak yang lain yang disini adalah kelompok sadar wisata Bira dan dampaknya kesadaran masyarakat mulai agak tumbuh. Akan tetapi kolaborasi ini tidak berjalan dengan baik karena pihak pokdarwis yang tidak aktif dalam berpartisipasi sehingga bisa kita lihat dari kondisi pantai Bira yang belum berkembang dengan baik....”(hasil wawancara dengan “AR” pada tanggal 13 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih bira sudah memberikan dampak seperti pengetahuan masyarakat akan sadar wisata sudah

ada dilihat dari kebiasaan sudah menjaga kebersihan lingkungan area pantai dan bersikap ramah terhadap wisatawan dan menjaga keamanan namun dampak ini bisa dikatakan belum cukup baik karena unsur dari SAPTA PESONA di Bira belum terwujud semua seperti keindahan dan ketertiban tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena keberadaan masyarakat di pinggir pantai membuat keindahan pantai berkurang dan membuat kenyamanan wisatawan berkurang. Hal yang disampaikan oleh informan ketua kelompok sadar wisata dalam wawancara berikut ini:

”....pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira yang tidak dapat dilakukan secara sendiri, makanya kami melibatkan diri dengan melakukan kolaborasi dengan pihak Dinas Pariwisata dalam pengelolaan pariwisata ini. Namun kolaborasi ini kami rasa belum memberikan dampak yang signifikan bagi wisata pantai bira dan seakan-akan pihak dari Dinas Pariwisata jalan masing-masing dan tidak mengangap keberadaan kami lagi....”(hasil wawancara dengan “MT” pada tanggal 15 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam proses kolaborasi yang dilakukan pada pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira memberikan dampak yaitu mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai sadar wisata dan membuka peluang lapangan kerja dan peluang pendapatan bagi masyarakat. Namun dampak dari kolaborasi belum signifikan karena kondisi bira yang belum berkembang dengan baik dilihat dari SAPTA PESONA dikawana Bira belum tercapai secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi pantai pasir putih Bira Kabupaten Bulukumba sudah memberikan dampak berupa kesadaran

masyarakat yang mulai tumbuh akan kepariwistaan serta membuka peluang pendapatan kepada masyarakat namun hal ini belum signifikan karena karena kondisi pantai Bira yang belum berkembang dengan baik dilihat dari SAPTA PESONA dikawasan pantai Bira belum tercapai secara keseluruhan dan pihak Dinas pariwisata seakan-akan jalan sendiri dalam melakukan pengelolaan dan mengesampingkan kelompok sadar wisata dari berbagai dampak yang dihasilkan dari proses kolaborasi ini tanggapan kedua pihak yang bekerjasama mengenai dampak yang dihasilkan sudah cukup baik walaupun masih ada tujuan yang belum dicapai. Hal ini ketika dikaitkan dengan teori dari Balogh dkk yang digunakan menunjukkan bahwa dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan pantai pasir putih bira sudah memberikan dampak yang kemudian menghasilkan umpan yang nantinya akan diadaptasi oleh kolaborasi.

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian diatas dapat diketahui tugas dari masing-masing pihak dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih bira Kabupaten Bulukumba.

No.	Lembaga	Tugas	Implementasi	Keterangan
1.	Dinas Pariwisata	1. penyediaan sarana dan prasarana	Terimplementasi namun belum maksimal	1.rehabilitasi mess pemda 2.pembangunan tangga menuju pantai bira 3.pembangunan tempat parker

		<p>2.sosialisasi mengenai sadar wisata</p> <p>3.pemberian Bimtek kepada anggota POKDARWIS</p>	<p>Terimplementasi namun jarang dilakukan</p> <p>Tidak terimplementasi</p>	<p>1.pemberian sosialisasi kepada masyarakat agar menumbuhkan kesadaran mengenai wisata</p> <p>Dinas pariwisata lebih memprioritaskan kelompok aktif</p>
2.	POKDARWIS	<p>1. Mengurusi kebersihan</p> <p>2. mengurus masalah keindahan</p> <p>3.mengurusi masalah keamanan dan ketertiban</p>	<p>Tidak terimplementasi</p> <p>Tidak terimplementasi</p> <p>terimplementasi</p>	<p>Kondisi pantai bira masih kotor karena jarang ada aksi bersih-bersih</p> <p>Kondisi kawasan pantai bira yang masih kurang asri</p> <p>Kondisi kawasan wisata yang aman</p>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab sebelumnya bahwa fokus peneliti pada kolaborasi pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira Kabupaten Bulukumba maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinamika dalam kolaborasi pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira Kabupaten Bulukumba masih kurang terlaksana dengan baik walaupun dalam pengungkapan sudah cukup baik karena melibatkan pihak kelompok sadar wisata namun kelompok ini secara kelembagaan tidak terlalu aktif, serta komunikasi belum berjalan dengan baik juga kurangnya kepercayaan antara kedua pihak dan komitmen mereka belum kuat walaupun dalam berkolaborasi sudah mengacu pada SK Kepala Dinas Pariwisata.
2. Tindakan-tindakan kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira Kabupaten Bulukumba dalam memfasilitasi kolaborasi belum maksimal karena jarang ada pelatihan dan sosialisasi tentang kepariwisataan guna meningkatkan kemampuan pihak yang berkolaborasi, dan untuk memajukan proses kolaborasi pihak yang bekerjasama jarang melakukan pertemuan.
3. Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira Kabupaten sudah memberikan dampak berupa kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh akan kepariwisataan serta membuka peluang pendapatan kepada masyarakat namun hal ini belum signifikan karena

karena kondisi pantai Bira yang belum berkembang dengan baik dilihat dari SAPTA PESONA dikawasan pantai Bira belum tercapai secara keseluruhan, walaupun demikian tanggapan kedua pihak yang bekerjasama mengenai dampak yang dihasilkan sudah cukup baik meski masih ada tujuan yang belum dicapai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang *Collaborative Governance* dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih Bira Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu peneliti menyarankan:

1. Dinas Pariwisata dan POKDARWIS harus lebih berperan aktif serta perlu ada regenerasi di pihak POKDARWIS agar lebih aktif lagi berkolaborasi dalam melakukan pengelolaan untuk mengembangkan pariwisata Bira.
2. Dinas Pariwisata dan POKDARWIS harus membangun komunikasi dan melakukan pertemuan. Serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada dikawasan wisata untuk memberikan pemahaman tentang sadar wisata.
3. Dinas Pariwisata dan POKDARWIS harus lebih meningkatkan lagi proses kolaborasi yang dilakukan agar dapat mengembangkan Bira menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C. dan Alinson G. 2007. *Collaborative governance In Theory And Practive. Journal Of Public Administration*. University of California berkeley.
- Ansell, C. dan Alinson, G. 2012. *Stewards, Mediator, and Catalyst: Tower A Model Of Collaborative Leadership1, The Inoviation Journal*. Vol.17 No.1
- Afdal, 2015. Kolaboratif: Kerangka Kerja Masa Depan, *Jurnal Konseling dan Pendidikan*. Vol.3 No.2.
- Ali, Muhammad fadlhy., 2018. Jumlah wisman ke Sulsel nsik hamper 30 persen. Makassar 3 September 2018 (<http://makassar.tribunnews.com/2-18/09/03/jumlah-wisman-ke-sulsel-naik-hampir-30-persen>)
- Balogh, dkk. 2012. *An Interative Framework for Collaborative Governance*, *Journal of Public Administration Research and Theory*
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan "Good Governance" Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dewi, R. T. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam pengembangan industri kecil (studi kasus tentang kerajinan reyog dan pertunjukan reyog di kabupaten ponorogo) Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Emerson, kirk, Nabatchi, Tina. 2015. *Collaborative Governance Regimes*, Georgetwon University Press.
- Hasanah Mauizatul. 2017, *Pengelolaan Pariwisata Alam Berbasis Masyarakat (Kasus Objek Wisata Alam Rammang-Rammang Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi)* Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar
- Haryono, Nanang. 2012. Jejaring Untuk Mengembangkan Kolaborasi Sektor Publik. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*. Th IV. Nomor 1, Januari-Juni 2012.
- Nurhas Irawan, Pawlowski JM, Jansen M, Stoffregen J. 2016 *OERauthors: Requirements For Collaboration OER Authoring Tools In Global Settings. Euopan Conference On Technology Enhanced Learning*, 460-465

- Nawawi, Ahmad, 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangkritis, jurnal nasional pariwisata. Vol.5 No.2.
- O'Flynn and John Wanna. 2008. *Collaborative Governance : A New Era Of Public Policy In Australia*. Australia : E Press.
- Peters, G. Guy and jhon pierre, 1998 "Governance whitout Government, Rethinking Publick Administration", *Journal of Public Administration Research and Theory* 8: 223-244.
- Susilawati 2016. "strategi pengembangan pariwisata pantai bira sebagai sumber unggulan pendapatan asli didaerah kabupten bulukumba", *Jurnal administrasi negara*. Vol.2 No.3
- Sudarmo dan Tika Mutiarawati. 2017. *Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan*. Jurnal Wacana Publik. Vol 1 No 2.
- Sambodo Giat Tri. 2016. "pelaksanaan collaborative governance di desa budaya brotot, galur, kulonprogo, DIY", *Jurnal ilmu pemerintahan dan kebijakan publik*. Vol.3 No.1
- Sugiyono, 2012. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Tresiana Novita, Duadji Noverman. 2017. *Jurnal Seminar nasional FISIP Unila kolaboratif pengelolaan pariwisata teluk kiluan (collaborative management of the teluk kiluan tourism)*.
- Zaenuri, Muhammad. 2016. *Tata kelola pariwisata-bencana dalam perspektif collaborative governance(studi kasus pariwisata-bencana lava tour merapi kabupaten selean)*

Peraturan dan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 188 tahun 2019 Tentang Penetapan Desa Wisata Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba.

Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba Tahun 2015